



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKIP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah berkontribusi positif atas pencapaian kinerja melalui pencapaian sasaran strategis dan sasaran program yang menjadi tanggung jawab Kepala Biro di dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

PL SEKRETARIS DAERAH

M. A. EFFENDY POHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	2
2. Biro Kesejahteraan Rakyat	4
3. Biro Hukum	6
4. Biro Perekonomian	7
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	9
6. Biro Administrasi Pembangunan.....	10
7. Biro Organisasi	12
8. Biro Umum	13
9. Biro Administrasi Pimpinan	16
1.2.2 Anggaran	19
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	20
1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	20
2. Biro Kesejahteraan Rakyat	20
3. Biro Hukum	21
4. Biro Perekonomian	21
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	22
6. Biro Administrasi Pembangunan.....	23
7. Biro Organisasi	24
8. Biro Umum	24
9. Biro Administrasi Pimpinan	25
1.4 Dasar Hukum.....	26
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	27

BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	28
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	35
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	37
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 49
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	49
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024	50
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	61
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	64
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	67
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	68
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	76
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	80
3.2 Realisasi Anggaran	88
 BAB IV PENUTUP	 98
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	18
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	19
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	28
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	31
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024 Setda Provsu	36
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024	38
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024.	40
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	50
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja	61
Tabel 3.3	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	64
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	67
Tabel 3.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	68
Tabel 3.6	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	76
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	81
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas:

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas:
perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, data wilayah, toponimi dan rupa bumi, Standar pelayanan minimal, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta fasilitasi pertanahan, fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan DPRD, penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serta administrasi perjalanan dinas luar negeri, penataan urusan kewenangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provsu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan daerah, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan Daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, pertanahan, data wilayah, toponimi, rupa bumi, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Standar pelayanan minimal;
- b. penyiapan perumusan bahan fasilitasi pemekaran daerah Kabupaten/Kota;
- c. fasilitasi pemberhentian, pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil

- Kepala Daerah, urusan pemerintahan daerah;
- d. penyiapan pelaksanaan bahan pengkajian, evaluasi dan rekomendasi dalam rangka persyaratan pengangkatan seorang camat pada Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. penyiapan pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan;
 - f. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas luar negeri Kepala Daerah, DPRD, ASN dan pihak lain yang dibiayai APBD;
 - g. fasilitasi penyelesaian NPHD dalam penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah;
 - h. penyiapan perumusan penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD;
 - i. penyiapan perumusan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, IKU, SPIP, SOP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - j. penyiapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan/atau antara pemerintah dengan badan usaha/swasta dalam dan luar negeri;
 - k. melaksanakan pengoordinasian penyiapan perumusan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, IKU, SPIP, SOP serta pembinaan kepegawaian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - l. pelaksanaan pengoordinasian penyiapan perumusan penyelenggaraan administrasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - m. pelaksanaan pengoordinasian penyiapan perumusan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang/aset Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - n. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
 - o. penyiapan pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - p. penyiapan pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
 - q. penyiapan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi penyelesaian penegasan batas daerah Provinsi,

- Kabupaten/Kota, dan Kelurahan/desa, serta pemutakhiran data wilayah dan kode wilayah, namanama rupabumi dan toponimi;
- r. penyiapan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 - s. penyiapan pengoordinasian bahan pelaksanaan rapat forkopimda;
 - t. penyiapan pelaksanaan pengoordinasian dan fasilitasi penyelesaian tertib administrasi pertanahan pada urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - u. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian Penetapan Keputusan Gubernur tentang tim persiapan pengadaan lahan dan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan lahan;
 - v. penyiapan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan gangguan ketertiban dan ketentraman, serta kawasan khusus bencana, kebakaran, dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan;
 - w. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
 - x. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
 - y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - z. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta fasilitasi mental spiritual, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan;
- d. dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan mental spiritual;
- g. fasilitasi kegiatan berbagai penilaian di bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. fasilitasi penyelenggaraan peringatan/upacara hari besar nasional;
- i. fasilitasi pengembangan dan pembinaan organisasi wanita dan gender;
- j. penyusunan dan penyajian peta kerawanan kesejahteraan rakyat/sosial;
- k. fasilitasi pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan kesejahteraan rakyat/sosial;
- l. penyelenggaraan administrasi Biro Kesejahteraan Rakyat;
- m. pengelolaan kepegawaian Biro Kesejahteraan Rakyat;
- n. pengelolaan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat;
- o. pengelolaan barang/aset Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
- p. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu.

3. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah, perumusan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum, evaluasi dan fasilitasi pembentukan produk hukum kabupaten/kota, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, kajian hukum, serta pemajuan hak asasi manusia, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Biro Hukum Setda Provsu menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan penyusunan produk hukum daerah;
- b. pengolahan dan penyajian bahan produk hukum daerah;
- c. perumusan kebijakan penyusunan produk hukum daerah, serta evaluasi dan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- d. penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- e. perumusan rancangan produk hukum daerah;
- f. pembahasan rancangan produk hukum daerah;
- g. pengurusan proses evaluasi, fasilitasi, klarifikasi dan verifikasi rancangan produk hukum daerah;
- h. pelaksanaan proses permohonan nomor register, penetapan dan pengundangan produk hukum daerah;
- i. pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum daerah serta pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- j. penerimaan, pencatatan dan pembukuan usul evaluasi dan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- k. pengkajian rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- l. pemberian rekomendasi sesuai dengan hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- m. penyiapan dan penyelesaian proses penetapan hasil evaluasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- n. penyelesaian surat rekomendasi sesuai hasil fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;

- o. pemberian nomor register rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- q. penerimaan permohonan dan/atau perintah bantuan hukum;
- r. pelaksanaan identifikasi permasalahan hukum;
- s. penyusunan langkah-langkah penanganan permasalahan hukum;
- t. penyiapan bahan persidangan penanganan perkara;
- u. penanganan proses pemeriksaan perkara di pengadilan;
- v. pengajuan upaya hukum;
- w. permohonan pelaksanaan putusan;
- x. pelaksanaan penanganan sengketa di luar pengadilan;
- y. penyiapan penyusunan bahan telaahan dan pertimbangan hukum;
- z. penyiapan bahan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- aa. pelaksanaan pemajuan hak asasi manusia;
- bb. penyelenggaraan administrasi Biro Hukum;
- cc. pengelolaan kepegawaian Biro Hukum;
- dd. pengelolaan keuangan Biro Hukum;
- ee. pengelolaan barang/aset Biro Hukum; dan
- ff. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum.

4. Biro Perekonomian

Biro Perekonomian Setda Provsu mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi, air dan sanitasi, pariwisata, perizinan dan investasi, perhubungan, BUMD dan BLUD, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Biro Perekonomian Setda Provsu menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kebijakan

- perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi, air dan sanitasi, pariwisata, perizinan dan investasi, perhubungan, BUMD dan BLUD;
- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi, air dan sanitasi, pariwisata, perizinan dan investasi, perhubungan, BUMD dan BLUD;
 - c. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi, air dan sanitasi, pariwisata, perizinan dan investasi, perhubungan, BUMD dan BLUD;
 - d. penyusunan kebijakan ekonomi makro dan mikro daerah;
 - e. penyusunan dan penyajian data dan informasi ekonomi makro dan mikro daerah;
 - f. fasilitasi kegiatan pengendalian inflasi daerah;
 - g. fasilitasi kegiatan percepatan akses jasa keuangan ke usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
 - h. fasilitasi pemberdayaan kelembagaan/ asosiasi/ perkumpulan perusahaan/ pengusaha dengan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
 - i. fasilitasi kerja sama dan kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
 - j. pelaksanaan koordinasi pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi, air dan sanitasi, pariwisata, perizinan dan investasi, perhubungan, BUMD dan BLUD;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi, air dan sanitasi, pariwisata, perizinan dan investasi, perhubungan, BUMD dan BLUD;

- l. fasilitasi kegiatan pengembangan akses pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
- m. penyelenggaraan administrasi Biro Perekonomian;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang/aset Biro Perekonomian; dan
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian.

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi bidang Pengadaan Barang dan Jasa serta pelayanan proses pemilihan penyedia barang jasa pemerintah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provsu menyelenggarakan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi bidang Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provsu serta pelayanan proses pemilihan penyedia barang jasa pemerintah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provsu mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi bidang Pengadaan Barang dan Jasa serta pelayanan proses pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah;
- b. perumusan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara;
- c. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan pembinaan, konsultasi, pendampingan, dan asistensi Pengadaan Barang dan Jasa pada perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi teknologi pengadaan barang dan jasa;
- f. pelayanan proses pemilihan penyedia barang dan jasa;

- g. pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik lokal;
- h. pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa;
- i. penyelenggaraan administrasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- k. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

6. Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah pada pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah pada pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah pada pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah pada pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,

- pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah pada pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- e. penyusunan dan pemberian fasilitasi pemberkasan pelaksanaan penataan urusan pemerintahan pembangunan daerah pada pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan hasil koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi;
- f. fasilitasi koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah pada pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- g. fasilitasi dan Asistensi Verifikasi RKA, RKAL, RKAP dan DPA, DPAL, DPPA Kegiatan APBD Provinsi.
- h. fasilitasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD dan APBN (Dekon/Tugas Pembantuan/DAK);
- i. penyusunan Peraturan Gubernur tentang satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- j. penyusunan Keputusan Gubernur tentang satuan biaya honorarium;
- k. menyelenggarakan fasilitasi dukungan kepada dekranasda dan instansi terkait pemprovsu dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui expo atau gelar produk kerajinan nasional dan potensi lainnya melalui stand pemprovsu di dalam dan luar negeri;
- l. fasilitasi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang dan wilayah, serta rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota;
- m. fasilitasi koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah lintas Kabupaten/Kota;
- n. penyelenggaraan administrasi Biro Administrasi Pembangunan;

- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang/aset Biro Administrasi Pembangunan; dan
- p. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan.

7. Biro Organisasi

Biro Organisasi mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Biro Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja provinsi serta serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- b. pengelolaan dan penyajian bahan perumusan kebijakan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja provinsi serta serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- c. perumusan kebijakan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja provinsi serta serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja serta fasilitasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

- e. pelaksanaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja serta fasilitasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- f. pemberian rekomendasi pelaksanaan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja serta fasilitasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. penyelenggaraan administrasi Biro Organisasi;
- h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang/aset Biro Organisasi; dan
- i. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi.

8. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset sekretariat daerah, serta Ketatausahaan pemerintah provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Biro Umum Setda Provsu menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- c. pengelolaan bangunan rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, serta Kantor Gubernur, Sekretariat PKK, Dharmawanita, Arsip Sekretariat Daerah dan Mess/Wisma/ Pesanggrahan/Asrama serta Aula Pemerintah Provinsi;
- d. pengelolaan kawasan kantor gubernur;
- e. penyelenggaraan kebersihan, keindahan, keteraturan/ketertiban dan kenyamanan Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris

Daerah, serta Kantor Gubernur, Sekretariat PKK, Dharmawanita, Arsip Sekretariat Daerah dan Mess/Wisma/Pesanggrahan/Asrama serta Aula Pemerintah Provinsi;

- f. pengelolaan retribusi dari penggunaan Mess/Wisma/Pesanggrahan/Asrama dan Aula Pemerintah Provinsi;
- g. penyediaan sarana, peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, serta Kantor Gubernur, Sekretariat PKK, Dharma Wanita, Arsip Sekretariat Daerah dan Mess/Wisma/Pesanggrahan/Asrama serta Aula Pemerintah Provinsi;
- h. pemeliharaan sarana, peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, serta Kantor Gubernur, Sekretariat PKK, Dharmawanita, Arsip Sekretariat Daerah dan Mess/ Wisma/Pesanggrahan/Asrama serta Aula Pemerintah Provinsi;
- i. pencatatan, pembukuan dan pelaporan tanah, bangunan gedung, sarana peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, serta Kantor Gubernur, Sekretariat PKK, Dharma Wanita, Arsip Sekretariat Daerah dan Mess/Wisma/Pesanggrahan/Asrama serta Aula Pemerintah Provinsi;
- j. pengelolaan kegiatan penyediaan, pengolahan dan penyajian logistik/konsumsi di Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- k. pengelolaan kegiatan penyediaan, pengolahan dan penyajian logistik/konsumsi terkait dengan tugas dan kegiatan Gubernur;
- l. penyediaan pakaian dinas dan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- m. pengelolaan kendaraan dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah;
- n. fasilitasi pemeliharaan kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarga;
- o. penyelenggaraan pelayanan tamu pemerintah daerah, Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah beserta istri/suami;
- p. penyediaan cendera mata pemerintah daerah;
- q. pengoordinasian dan pengajuan UP, GU, TU dan LS lingkup Sekretariat Daerah;

- r. pengoordinasian dan pengajuan SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ lingkup Sekretariat Daerah;
- s. pelaksanaan tugas verifikasi surat pertanggungjawaban lingkup Sekretariat Daerah;
- t. pelaksanaan monitoring realisasi anggaran lingkup Sekretariat Daerah;
- u. pengurusan pembayaran gaji, tunjangan melekat pada gaji, tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan lainnya Gubernur, Wakil Gubernur dan jajaran Sekretariat Daerah;
- v. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) lingkup Sekretariat Daerah;
- w. pengelolaan barang milik daerah yang dipergunakan pada lingkup Sekretariat Daerah;
- x. penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan genset, AC central, lift dan sistem monitoring pengendalian elektronik secara tersentral kantor gubernur;
- y. pengurusan, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan instalasi listrik, air dan telepon kantor gubernur;
- z. penerimaan, pencatatan, pembukuan, pengendalian dan pendokumentasian surat masuk ke Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan jajaran Sekretariat Daerah;
- aa.penerimaan, pencatatan, pembukuan, pentaglikan, pengendalian dan pendokumentasian surat keluar dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- bb.pembinaan pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Provinsi pada Perangkat Daerah;
- cc.pembinaan Ketatausahaan, tata naskah dinas dan surat-menyurat;
- dd.penyelenggaraan administrasi Biro Umum;
- ee.pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang/aset Biro Umum; dan
- ff. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum.

9. Biro Administrasi Pimpinan

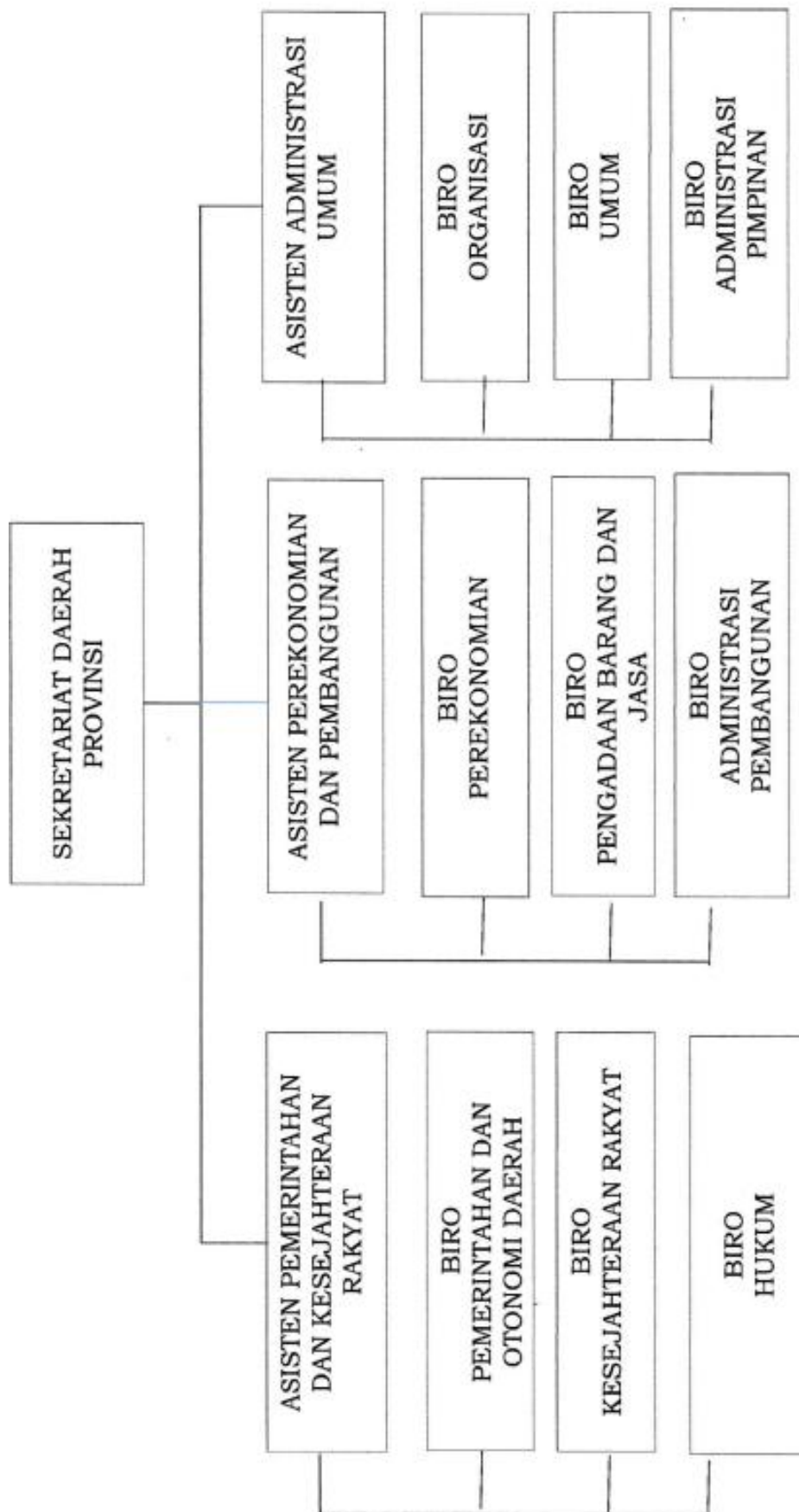
Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi pimpinan, keprotokolan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu Pemerintah Daerah dan pimpinan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi keprotokolan, perjalanan dinas, pelayanan tamu utama pemerintah daerah dan pimpinan, komunikasi pimpinan, penyusunan materi sambutan/paparan/pengarahan Gubernur, Wakil Gubernur, pelaksanaan fungsi juru bicara Pimpinan Daerah serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah;
- b. Pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi keprotokolan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah dan Pimpinan;
- c. Penyusunan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan pedoman/juklak/juknis keprotokolan Pemerintah Daerah, perjalanan dinas dan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah dan Pimpinan;
- d. Pengurusan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, pemantauan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. Pengurusan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kedinasan Sekretaris Daerah;
- f. Penghimpunan dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- g. Pengurusan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah, Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- h. Pembinaan keprotokolan pada perangkat daerah;
- i. Penjadwalan, pencatatan, monitoring, pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan acara Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Pelaksanaan analisis terhadap acara yang patut dihadiri langsung Gubernur atau Wakil Gubernur;
- k. Pengumpulan, pengolahan, pengembangan, penyajian dan penyimpanan dokumen, konten dan komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur;
- l. Pengumpulan, pengolahan, pengembangan dokumen kepegawaian Sekretariat Daerah;
- m. Pengorganisasian dan penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah;
- n. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana strategis Sekretaris Daerah;
- o. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA Sekretariat Daerah;
- p. Pelaksanaan evaluasi Renja, RKA dan DPA Sekretariat Daerah;
- q. Pengoordinasian dan penyusunan LPPD, LKPJ, LK, PK, IKU, IKK dan Laporan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- r. Penyelenggaraan administrasi Biro Administrasi Pimpinan;
- s. Pengelolaan kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan;
- t. Pengelolaan keuangan Biro Administrasi Pimpinan;
- u. Pengelolaan barang/aset Biro Administrasi Pimpinan;
- v. Penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Biro	Sumber	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemerintahan dan Otonomi Daerah	APBD	Rp. 7.948.000.000	
	APBD		Rp. 6.412.400.000
Biro Kesejahteraan Rakyat	APBD	Rp. 481.612.840.434	
	APBD		Rp. 476.333.677.071
Biro Hukum	APBD	Rp. 6.124.000.000	
	APBD		Rp. 5.784.304.714
Biro Perekonomian	APBD	Rp3.617.309.990	
	APBD		Rp2.161.789.318
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	APBD	Rp. 5.469.672.176	
	APBD		Rp. 3.071.717.100
Biro Administrasi Pembangunan	APBD	Rp. 4.273.977.954	
	APBD		Rp. 2.575.021.771
Biro Organisasi	APBD	Rp 4.234.668.774	
	APBD		Rp 4.499.959.472
Biro Umum	APBD	Rp. 431.851.821.130	
	APBD		Rp. 307.254.927.662
Biro Administrasi Pimpinan	APBD	Rp. 9.770.703.442	
	APBD		Rp. 14.157.150.928
Total		Rp. 954.902.993.900	Rp. 822.250.948.036

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (terbatasnya staf yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan tupoksi);
- b. Belum optimalnya proses pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Kab/Kota;
- c. Peningkatan Kerjasama antar daerah, nasional dan internasional;
- d. Belum optimalnya proses Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi pegawai Provinsi dan Kab/Kota;
- e. Belum optimalnya pembinaan dan penilaian kecamatan terbaik;
- f. Belum optimalnya penyelesaian penegasan batas daerah dan konflik pertanahan Provinsi dan Kab/Kota.

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

Sumatera Utara merupakan Provinsi yang memiliki jumlah rumah ibadah sebanyak 29.745 (Dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima). Dari sejumlah rumah ibadah tersebut masih banyak terdapat rumah ibadah yang perlu dilakukan pembangunan dan rehabilitasi khususnya di wilayah terpencil, daerah miskin, kampung nelayan daerah rawan aqidah, pegunungan dan kepulauan. Rumah ibadah merupakan potensi besar sebagai lembaga umat dan tempat bertemunya umat dari berbagai latar belakang. Rumah-rumah ibadah ini perlu mendapat perhatian lebih terutama masjid yang merupakan rumah ibadah mayoritas/jumlah terbesar di Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya untuk mendukung kerukunan umat beragama yang lebih baik.

Dalam hal pendidikan, masyarakat Sumatera Utara memiliki minat yang sangat baik untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi di tempat pendidikan formal yang lebih baik. Namun karena faktor ekonomi yang masih belum memadai maka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi tersebut tidak dapat diwujudkan.

Dengan berbagai permasalahan yang berkembang tersebut, maka Isu strategi yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara lain adalah:

- a. Bagaimana edukasi peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara melalui upaya-upaya pembinaan, Fasilitasi, koordinasi dan kerjasama secara menyeluruh dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan;
- b. Upaya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara dengan instansi - instansi terkait;
- c. Peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, untuk Pendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Utara.
- d. Memberikan bantuan hibah kepada rumah ibadah dengan berturut-turut serta dan berperan aktif dalam Kegiatan Strategis Daerah dengan menetapkan target dan realisasi sesuai perencanaan yang disepakati.

3. Biro Hukum

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Hukum Setda Provsu. Adapun beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Setda Provsu adalah:

- a. Belum maksimalnya koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait dan Pemerintah Pusat dalam hal penyusunan produk hukum provinsi dan Kabupaten/Kota serta penanganan perkara. Faktor yang mempengaruhi adalah sasaran kinerja utama dan indikator kinerja utama pada Renstra perangkat daerah belum menggambarkan penjabaran dari sasaran kinerja utama dan indikator kinerja utama RPJMD.
- b. Kurang maksimalnya pelayanan bantuan hukum dan penanganan perkara. Faktor yang mempengaruhi kurangnya SDM yang memadai.

4. Biro Perekonomian

Permasalahan dan isu strategis Biro Perekonomian SetdaprovSU sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Kurangnya tenaga aparatur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga aparatur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi serta kurangnya Kapasitas Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN tentang pemanfaatan teknologi.

- b. Pengelolaan data lengkap tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien, hal ini disebabkan oleh Kurangnya SDM yang proporsional dibidangnya.
 - c. Belum maksimalnya fasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, hal ini disebabkan oleh Fasilitas sarana dan prasarana Pendukung kinerja belum terkelola dengan baik serta Kurangnya tatakelola sarana dan prasarana pendukung kinerja.
 - d. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
 - e. Belum optimalnya Kebijakan Pemerintah daerah dalam mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan Daerah yang tinggi dan berkualitas.
 - f. Belum optimalnya kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
 - g. Belum optimalnya kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan BUMD/BLUD untuk mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
- Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga kurang tepat waktu

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai Perubahan Renstra 2024 – 2026 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah belum optimalnya pencapaian kinerja dan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh faktor penghambat yaitu kurangnya pembinaan analisis perencanaan barang di Perangkat Daerah dan Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu karena kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dalam penyampaian proses pengadaan barang. Sedangkan faktor pendorong adalah peningkatan sarana pengolah aplikasi dan data serta adanya aplikasi LPSE, adanya Pokja yang bersertifikasi, dan adanya komitmen Pimpinan Daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka Isu strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provsu adalah Optimalisasi pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

6. Biro Administrasi Pembangunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu Tahun 2025, mempunyai Isu Strategis atau masalah yang mempengaruhi pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mewujudkan Sasaran Kinerja dalam Tahun 2025.

Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu adalah:

A. Internal

1. Pada Bagian Biro Administrasi Pembangunan, penentuan pilihan program kegiatan amat bergantung pada tingkat pemenuhan kebutuhan anggaran yang bersifat rutin, seperti program kebijakan administrasi pembangunan.
2. Pengelolaan data lengkap tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
3. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi dan kurang memahami tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
4. Kurangnya hubungan koordinasi antar setiap bagian.
5. Perencanaan yang kurang matang menyebabkan sulitnya mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
6. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga tidak tepat waktu.
7. Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal

B. Eksternal

1. Pemahaman Admin Perangkat Daerah yang sudah di usulkan oleh Perangkat Daerah pada pelaksanaan Penginputan Aplikasi PRP2SUMUT terkait Realisasi Anggaran Fisik dan Non Fisik.
2. Keterlambatan Admin PRP2SUMUT dalam penginputan Realisasi Anggaran Fisik dan Non Fisik pada Aplikasi PRP2SUMUT .
3. Keterbatasan SDM pada Biro Administrasi Pembangunan untuk mendukung kinerja yang sudah disusun sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam mendukung operasional dan rutinitas perkantoran, serta menunjang pelaksanaan pelayanan.
5. Pelaksanaan Efisiensi Anggaran yang dilakukan secara bertahap terkait Pelaksanaan Anggaran di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan di Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu adalah:

- a. Kurangnya wawasan PNS terhadap tugas dan fungsinya.
- b. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal.
- c. Belum adanya standar operasional dan prosedur yang baku.
- d. Kurangnya SDM yang paham dengan IT.
- e. Sarana dan Prasarana yang kurang dimanfaatkan secara maksimal.

7. Biro Organisasi

Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi dapat dilihat dibawah ini.

Faktor Penghambat:

- a. Kurangnya tenaga aparatur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi;
- b. Pengelolaan data lengkap tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien;
- c. Belum maksimalnya fasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Biro Organisasi Setda Provsu;
- d. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi;
- e. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga tidak tepat waktu;
- f. Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal.

Faktor Pendukung:

- a. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan;
- b. Merestrukturisasi staf dengan personel yang mempunyai kompetensi dan komitmen terhadap tugas dan kewajibannya;
- c. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana operasional;
- e. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi;
- f. Memanfaatkan teknologi informasi

8. Biro Umum

Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provsu adalah:

Internal

- a. Pada Bagian Biro Umum, penentuan pilihan program kegiatan amat bergantung pada tingkat pemenuhan kebutuhan anggaran yang bersifat rutin, seperti program pelayanan administrasi perkantoran dan Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta kegiatan yang bersifat pemeliharaan lainnya.

- b. Pengelolaan data lengkap tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
- c. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi dan kurang memahami tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
- d. Kurangnya hubungan koordinasi antar setiap bagian.
- e. Perencanaan yang belum matang menyebabkan sulitnya mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- f. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga tidak tepat waktu.
- g. Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal

Eksternal

- a. Kuota plafon RAPBD dari TAPD yang terbatas.
- b. Fluktuasi kegiatan pimpinan yang sulit diprediksi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan di Biro Umum Setda Provsu adalah:

- f. Kurangnya wawasan PNS terhadap tugas dan fungsinya.
- g. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal.
- h. Belum adanya standar operasional dan prosedur yang baku.
- i. Kurangnya SDM yang paham dengan IT.
- j. Sarana dan Prasarana yang kurang dimanfaatkan secara maksimal.

9. Biro Administrasi Pimpinan

Penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi pelayanan kegiatan pimpinan harus didukung oleh sumber daya manusia yang potensial dengan memaksimalkan perkembangan teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menciptakan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu yang profesional. Selain itu sarana dan prasarana teknologi informasi harus mampu mengikuti perkembangan zaman mengingat peran dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu yang cukup luas dan sangat strategis, antara lain:

- a. Pelayanan Bahan Materi Pimpinan: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu berperan menyiapkan dan menyajikan bahan materi dan paparan pimpinan.

- b. Pelayanan Komunikasi Pimpinan: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu senantiasa berperan melaksanakan fasilitasi komunikasi pimpinan kepada lembaga/instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pelayanan Protokol: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu berperan melaksanakan fasilitasi keprotokolanan pimpinan dan tamu.

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Perjanjian Kinerja Perubahan
3. Matriks Renstra
4. LHE SAKIP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah meningkatnya pelayanan kebijakan dan pelayanan di Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah								
1.	Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			2,7	2,9	3,4
		Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Persentase Kerjasama yang difasilitasi			100%	100%	100%
Biro Kesejahteraan Rakyat								
2.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Persentase proposal hibah yang di tindaklanjuti	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	75%	75%	75%	75%	75%
Biro Hukum								
3.	Terciptanya Kepastian Hukum Atas Produk Hukum Daerah dan Terlaksananya Pelayanan	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi	Jumlah Penyelesaian penyusunan rancangan produk hukum daerah tepat waktu	40 Perda/ Pergub	40 Perda/ Pergub	40 Perda/ Pergub	45 Perda/ Pergub	50 Perda/ Pergub
				450	450	450	455	460

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah								
	Bantuan Hukum kepada ASN dan Masyarakat serta Perlindungan HAM	Produk Hukum Daerah.	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan	Perda/Perkada 700 Produk Hukum	Perda/Perkada 700 Produk Hukum	Perda/Perkada 700 Produk Hukum	Perda/Perkada 705 Produk Hukum	Perda/Perkada 710 Produk Hukum
		Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	1. Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan.	25 Perkara	25 Perkara	25 Perkara	30 Perkara	35 Perkara
			2. Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM.	23 Kegiatan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	28 Kegiatan	33 Kegiatan
Biro Perekonomian								
4.	Meningkatkan dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan			100%	100%	100%
			Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat			66,67%	83,33%	100%
			Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi			18 UPTD	5 UPTD	5 UPTD
Biro Pengadaan Barang dan Jasa								
6.	Meningkatnya pelayanan kebijakan dan pelayanan di Provinsi Sumatera Utara	Mewujudkan pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang transparan, akuntabel dan memenuhi standarisasi LPSE LKPP	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelayanan Standarisasi LPSE	100%	100%	100%	100%	100%
Biro Administrasi Pembangunan								
7.	Mewujudkan Kebijakan dalam	Menciptakan Kebijakan dalam Pelaksanaan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk	20 Dokume n	18 Dokume n	20 Dokume n	20 Dokume n	20 Dokume n

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah								
	Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Daerah					
			Persentase Realisasi Fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	95 %	95%	98%	98%	98%
Biro Organisasi								
8.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang berintegritas	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Pelayanan Publik	4.01 (B)	4.20 (A-)	4.30 (A-)	4.40 (A-)	4.51 (A)
			Nilai capaian pelaporan kinerja	14	15	11.75	12.00	12.15
Biro Umum								
9.	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	100%	100%	100%	100%	100%
Biro Administrasi Pimpinan								
11.	Memberikan pelayanan kegiatan pimpinan	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi materi pimpinan	-	-	100%	100%	100%
			Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	-	-	100%	100%	100%

Sumber : Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Periode 2024-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biro Pemetintahan dan Otonomi Daerah						
1.	Tujuan : Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai / Predikat	Penilaian LPPD dilakukan untuk menilai capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan	Hasil Penilaian Kinerja Pemerintahan Daerah	Biro Pem Otda
		Persentase Kerjasama yang difasilitasi	Persen	Kerjasama dilakukan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik yang lebih efisien	Jumlah kerjasama yang teralisasi dibagi jumlah kerjasama yang difasilitasi dikali 100%	Biro Pem Otda
Biro Kesejahteraan Rakyat						
2.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Persentase proposal hibah yang di tindak lanjuti	Persen			
		Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen			

Biro Hukum						
3.	<p>Tujuan: Terciptanya Kepastian Hukum Atas Produk Hukum Daerah dan Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum kepada ASN dan Masyarakat serta Perlindungan HAM</p> <p>Sasaran: 1.Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.</p> <p>2.Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat</p>	1. Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu. 1. Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan.	Perda/ Pergub	1. Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	Jumlah Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah difasilitasi oleh Kemendagri dibagi dengan Jumlah Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dikali 100%.	Bagian Perundang-undangan Provinsi
			Perda/ Perkada	2. Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi dibagi dengan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang telah dimohon untuk evaluasi dan fasilitasi dikali 100%.	Bagian Perundang-undangan Kab/Kota
			Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	3. Rancangan Keputusan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	Jumlah Keputusan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya yang telah dieksaminasi dibagi dengan Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya yang diusulkan dikali 100%.	Bagian Perundang-undangan Provinsi
		2. Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan.	Produk hukum	Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Setda Provsu.	Jumlah Pergub dan Perda yang diinformasikan dibagi dengan Jumlah Pergub dan Perda yang telah ditetapkan dikali 100%.	Bagian Perundang-undangan Provinsi
		1. Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan.	Perkara	Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	Jumlah perkara hukum yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara yang masuk dikali 100%.	Bagian Bantuan Hukum
		2. Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM	Kasus/ masalah	Penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dan perlindungan HAM di lingkungan Pemprovsu.	Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM dan Kegiatan Penghormatan,	Bagian Bantuan Hukum

					Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang dilaksanakan dan Analisa dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Daerah. yang dilaksanakan dibagi dengan Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM dan Kegiatan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang direncanakan dikali 100%.	
Biro Perekonomian						
4.	Mewujudkan dukungan kebijakan lingkup Perekonomian Daerah.	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	Persentase	Kebijakan Lingkup Perekonomian yang diimplementasikan untuk peningkatan perekonomian daerah yang berkualitas.	Jumlah bahan kebijakan yang diimplementasikan dibagi Jumlah bahan kebijakan yang dihasilkan dikali 100 %	Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan, Surat Edaran dan Himbauan terkait perekonomian
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	Persentase	BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	Jumlah BUMD kinerja keuangan yang sehat dibagi Jumlah BUMD yang dibina dikali 100 %	Laporan Keuangan dan Laporan Evaluasi Kinerja BUMD
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	Persentase	BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	Jumlah BLUD kinerja pelayanan tinggi dibagi Jumlah BLUD yang dibina dikali 100 %	Laporan Keuangan dan Laporan Evaluasi Kinerja BLUD
Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
5.	Mewujudkan pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang transparan, akuntabel dan memenuhi	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Paket	Pencapaian target realisasi pembangunan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah Provsu yang berasaskan transparan dan akuntabel	Jumlah paket yang masuk : Jumlah paket yang ditenderkan x 100%	LPSE Sumut

	standarisasi LPSE LKPP	Persentase Pelayanan Standarisasi LPSE	Standarisasi LPSE	Pencapaian 17 Standarisasi LPSE disesuaikan dengan target LKPP	Standarisasi LPSE Provsu : Standarisasi LKPP x 100%.	LKPP
Biro Administrasi Pembangunan						
6.	Menciptakan Kebijakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Daerah	Dokumen	Kebijakan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah kemudian dibuat oleh Biro Administrasi Pembangunan untuk ditandatangani Gubernur	Jumlah Kebijakan yang sudah ditandatangani Gubernur	Biro Administrasi Pembangunan
		Persentase Realisasi Fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi.	Persen	Data Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi PRP2SUMUT	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang ada}} \times 100\%$	Aplikasi PRP2SUMUT
Biro Organisasi						
7.	Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang berintegritas Sasaran: Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	Memenuhi amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah BAB VIII tentang Perangkat Daerah	Jumlah usulan yang ditindaklanjuti Jumlah usulan penataan kelembagaan Perangkat Daerah	Biro Organisasi Setda Provsu 100
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	<ul style="list-style-type: none"> UU No 25/2009 ttg Pelayanan Publik; PP No. 96/2012 ttg Pelaksanaan UU No. 25/2009 ttg pelayanan publik; Peraturan Menteri PAN dan RB No 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 	Hasil Nilai Evaluasi Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB	Biro Organisasi Setda Provsu
		Nilai capaian pelaporan kinerja	Predikat	Sesuai PP No 29/2014, SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah dalam	Laporan hasil evaluasi Kementerian PANRB	Biro Organisasi Setda Provsu

				rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah		
Biro Umum						
8.	Meningkatnya Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan Daerah	Persentase Layanan Kerumah tanggaan Pimpinan Daerah	Persentase (%)	Pelaksanaan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah Adalah Pemenuhan Kebutuhan Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas yang dilayani}}{\text{Jumlah Permintaan Fasilitas Kerumahtanggaan Pimpinan}} \times 100$	Dokumen laporan Fasilitas Pelayanan Kerumah tanggan Pimpinan Daerah yang dilayani
9.	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase (%)	PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov adalah Retribusi yang diperoleh dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov yang dikelola Biro Umum Setda Prov	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD dari Pemanfaatan dan Mess Pemprov}}{\text{Target PAD dari Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov}} \times 100$	Dokumen Laporan Realisasi PAD
Biro Administrasi Pimpinan						
10.	Tujuan: Memberikan pelayanan kegiatan pimpinan	Persentase fasilitasi materi pimpinan	Persen	Fasilitasi materi pimpinan	$\frac{\text{Jumlah bahan materi yang disiapkan}}{\text{Jumlah kegiatan pimpinan}}$	Biro Administrasi Pimpinan
	Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persen	Pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi kegiatan pimpinan yang berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pimpinan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pimpinan}} \times 100$	Biro Administrasi Pimpinan

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Setda Provsu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah					
1.	Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai / Predikat	2,7
		Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Persentase kerjasama yang terealisasi	Persentase	100
Biro Kesejahteraan Rakyat					
2.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Persentase proposal hibah yang di tindaklanjuti	Persen	75%
			Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	75%
Biro Hukum					
3.	Terciptanya Kepastian Hukum Atas Produk Hukum Daerah dan Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum kepada ASN dan Masyarakat serta Perlindungan HAM	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu.	Perda/ Pergub	40
			2. Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan	Perda/ Perkada	450
				Produk hukum	700
		Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	1. Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan.	Perkara	25
			2. Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM.	Produk Hukum	40
				Kasus/ masalah	23
Biro Perekonomian					
4.	Meningkatkan dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	Persen	100
			Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	Persen	100
			Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	Persen	100
Biro Pengadaan Barang dan Jasa					
5.	Meningkatnya pelayanan kebijakan dan pelayanan di Provinsi Sumatera Utara	Mewujudkan pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang transparan, akuntabel dan memenuhi standarisasi LPSE LKPP	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
			Persentase Pelayanan Standarisasi LPSE	Persen	100

Biro Administrasi Pembangunan					
6.	Mewujudkan Kebijakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Menciptakan Kebijakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Daerah	Dokumen	20
			Persentase Realisasi Fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	Persen	95
Biro Organisasi					
7.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang berintegritas	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100
			Indeks Pelayanan Publik	Predikat	4.30
			Nilai capaian pelaporan kinerja	Predikat	11.75%
Biro Umum					
8.	Terwujudnya Pelayanan Kerumaha tanggaan Pimpinan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Kerumaha tanggaan Pimpinan Daerah	Persentase Layanan Kerumaha tanggaan Pimpinan Daerah	Persen	100%
9.	Terwujudnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	Persen	100%
Biro Administrasi Pimpinan					
10.	Memberikan pelayanan kegiatan pimpinan	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi materi pimpinan	Persen	100
			Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persen	100

Sumber : Rencana Kerja Biro Biro Setda Provsu Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,7
2.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Persentase kerjasama yang terealisasi	100%
Biro Kesejahteraan Rakyat			
3.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Persentase proposal hibah yang ditindaklanjuti	75%
		Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	75%
Biro Hukum			
4.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	40 Perda/ Pergub
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	700 produk hukum
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	40 produk hukum
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	25 Perkara
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	15 Kasus/ masalah
Biro Perekonomian			
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100 %
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	100 %
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
7.	Mewujudkan Proses dan pelayanan/Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang transparan, akuntabel dan terstandar	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	100 %
		Pemenuhan 17 Standarisasi LPSE	17 Standarisasi
Biro Administrasi Pembangunan			

8.	Menciptakan Kebijakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Daerah	20 Dokumen
		Persentase Realisasi Fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	95 %
Biro Organisasi			
9.	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %
		Indeks Pelayanan Publik	4.30
		Nilai capaian pelaporan kinerja	11.75%
Biro Umum			
10.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	100%
11.	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	100%
Biro Administrasi Pimpinan			
12.	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi materi pimpinan	100%
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Setda Provsu Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan sesuai dengan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sedangkan sasaran strategis dan indikator kinerja tidak mengalami perubahan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan

	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%
	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan

	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%
	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan
Biro Kesejahteraan Rakyat			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	75%
	Program Kesejahteraan rakyat	Persentase Proposal Permohonan Belanja Hibah yang ditindaklanjuti	75%
Biro Hukum			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%
	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan SKPD	15 dokumen
	B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	55 orang
	4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	220 orang
	C. Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%
	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Makan dan Minum Rapat Kantor	48 paket
	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan/Fotocopy	210000 paket
	3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	0
	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	100 laporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman surat/paket	550 surat
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26 unit
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor Biro Hukum	6 orang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lancarnya Tugas Aparatur Biro Hukum	110 unit
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		
	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Draft Ranperda yang dibahas (dalam & di luar Propemperda), Jumlah Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting, Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun.	80 dokumen
	2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	750 dokumen

	3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Kompilasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disusun, Jumlah Sistem Jaringan dokumentasi & Informasi Kab/Kota yang terintegrasi	20 dokumen
	4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	600 dokumen
	Fasilitasi Bantuan Hukum		100%
	1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan & Jumlah Penanganan Perkara yang difasilitasi	35 kasus
	2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Fasilitasi Dokumen RANHAM & Jumlah Penanganan Masalah Non Litigasi yang difasilitasi	40 kasus
Biro Perekonomian			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	90%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Keuangan</i>	90%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian</i>	1 Orang
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian</i>	12 bulan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.000 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik</i>	10 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang diimplementasikan	100%
	<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i>	95%
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen
	<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	<i>Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	3 Dokumen

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 dokumen
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	8 dokumen
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 dokumen
	<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	<i>Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	3 Dokumen
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	15 dokumen
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	12 dokumen
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	12 dokumen
Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah tender/seleksi yang diselesaikan	201 paket
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai 17 Standar LPSE	2 Kab/ Kota
Biro Administrasi Pembangunan			
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<i>Persentase Manajemen Administrasi Umum dan Kepegawaian yang terkelola dengan Baik</i>	40 OPD
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terpenuhinya Layanan Administrasi Penata Usahaan dan Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %
3	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	50 Dokumen
4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya ASN yang memiliki kemampuan manajemen berdasarkan tugas dan fungsi</i>	100 %
5	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	15 Orang
6	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Jumlah Kegiatan Kepegawaian pada Biro Administrasi Pembangunan</i>	
7	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi</i>	100 %
8	<i>Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	
9	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	100 %
10	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	50.000 Paket
11	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	49 Laporan

12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
13	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara secara rutin	15 Unit
15	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>15 Unit</i>
16	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	100%
17	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya data Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan
18	<i>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD</i>	<i>49 Laporan</i>
19	<i>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN</i>	<i>25 Laporan</i>
20	<i>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN</i>	<i>33 Laporan</i>
21	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan fisik, keuangan APBD Provsu serta Kab/Kota berdasarkan capaian kinerja dan analisis pembangunan daerah	40 Perangkat Daerah
22	<i>Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah</i>	<i>Tersedianya laporan capaian kinerja pembangunan daerah pada anggaran APBD berdasarkan analisis capaian kinerja pembangunan daerah</i>	<i>2 Laporan</i>
23	<i>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>30 Laporan</i>
24	<i>Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah</i>	<i>Rumusan capaian kinerja keuangan dan fisik OPD Provsu</i> <i>Tersedianya bahan rumusan kebijakan pembangunan daerah</i>	<i>30 Perangkat Daerah</i> <i>2 Laporan</i>
Biro Organisasi			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas Layanan Administrasi Perkantoran	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan	6 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN	Jumlah ASN dan Non ASN pengelola administrasi pelaksanaan tugas	10 Dokumen
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN pengelola administrasi pelaksanaan tugas	6 Dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat	4 Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	752 Buah paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	223.496 Lembar paket
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	200 Orang laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	15 Kali laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	4 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat yang terkirim	323 Dokumen
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diservice	70 Unit
	Program Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses	100%
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Penataan Kelembagaan dan Anjab ABK	100%
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Penataan Kelembagaan Provinsi	100%
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	100%
	Penataan Analisis Jabatan	Persentase Penataan Analisis Jabatan	100%
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	100%
	Pembinaan Pelaksana Reformasi Birokrasi	Persentase Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pelaksanaan Monev Akuntabilitas Kinerja	100%
	Evaluasi Pelaksana Budaya Kerja	Persentase Pelaksanaan Budaya Kerja	100%
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintah	Persentase Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	100%
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	100%
Biro Umum			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase (%)	100%
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	1 Tahun
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	1 Tahun
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	1 Tahun
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan
14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan Kegiatan	1 Tahun
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 Unit
16	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	1 Tahun
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	1 Tahun
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160 Unit
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit
27	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	1 Tahun

28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan
29	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket
30	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Paket
31	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	1 Tahun
32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	35 Paket
33	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	35 Paket
34	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	25 Paket
35	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase	100%
36	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	1 Tahun
37	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan
Biro Administrasi Pimpinan			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		100%
	<i>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</i>		100%
	Penyiapan Materi Pimpinan	Persentase fasilitasi materi pimpinan	730 Dokumen
	Fasilitasi Komunikasi pimpinan		730 Laporan
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		730 Laporan
	<i>Fasilitasi Keprotokolan</i>		100%
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	730 Laporan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		365 Laporan
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		365 Laporan
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		365 Laporan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah						
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,7	Hasil Masih dalam Evaluasi Kemendagri	100%	Biro Pem Otda
2.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Persentase kerjasama yang terealisasi	100%	100%	100%	Biro Pem Otda
Biro Kesejahteraan Rakyat						
4.	Meningkatnya peran pembinaan dari berbagai kalangan yang berkompten terhadap kehidupan bermasyarakat dan beragama	Persentase proposal hibah yang di tindaklanjuti	75%	Rp. 3.956.270.749	84,57%	LRA
		Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	75%	Rp. 344.524.018.258	73,05%	LRA
Biro Hukum						
5.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	40 Perda/ Pergub	43 Perda/ Pergub	107,5%	Bagian PUU Provinsi
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3%	Bagian PUU Kab/Kota
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8%	Bagian PUU Provinsi

		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5%	Bagian PUU Provinsi
6.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	25 perkara	38 perkara	152%	Bagian Bantuan Hukum
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	15 Kasus/ masalah	23 Kasus/ masalah	153,3%	Bagian Bantuan Hukum
Biro Perekonomian						
	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100 %	100%	100%	Biro Perekonomian
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	50 %	50%	100%	Biro Perekonomian
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
8.	Mewujudkan Proses dan pelayanan/ Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang transparan, akuntabel dan terstandar	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	201 paket	201 paket	100%	LPSE
		Pemenuhan 17 Standarisasi LPSE	2 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	100%	LKPP
Biro Administrasi Pembangunan						
7.	Menciptakan Kebijakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %	Berkas Pertinggal Kebijakan pada Biro Administrasi Pembangunan
		Persentase Realisasi Fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	95 %	95.58%	95%	Aplikasi PRP2SUMUT
Biro Oganisasi						

		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5%	Bagian PUU Provinsi
6.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	25 perkara	38 perkara	152%	Bagian Bantuan Hukum
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	15 Kasus/ masalah	23 Kasus/ masalah	153,3%	Bagian Bantuan Hukum
Biro Perekonomian						
	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100 %	100%	100%	Biro Perekonomian
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	50 %	50%	100%	Biro Perekonomian
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
8.	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100%	Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provsu
		Indeks Pelayanan Publik	4.35	3.90	90.70%	Kementerian PAN dan RB RI
		Nilai capaian pelaporan kinerja	11.75	11.45	97.45%	Kementerian PAN dan RB RI
Biro Umum						
9.	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kerumahan tanggaaan Pimpinan	100%	100%	100%	Dokumen Fasilitas Pelayanan Kerumahan tanggaaan Pimpinan Daerah yang dilayani
10.	Meningkatnya Pemanfaatan	Persentase Kontribusi PAD	100%	92,39%	92,39%	Dokumen Laporan

		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5%	Bagian PUU Provinsi
6.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	25 perkara	38 perkara	152%	Bagian Bantuan Hukum
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	15 Kasus/ masalah	23 Kasus/ masalah	153,3%	Bagian Bantuan Hukum
Biro Perekonomian						
	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100 %	100%	100%	Biro Perekonomian
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	50 %	50%	100%	Biro Perekonomian
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
Biro Pengadaan Barang dan Jasa						
	Gedung dan Mess Pemprovsu	dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu				Realisasi PAD
Biro Administrasi Pimpinan						
	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi materi pimpinan	100%	100%	100%	Kegiatan Pimpinan
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Kegiatan Pimpinan

Uraian penjelasan tabel Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah:

1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah Nilai Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan pada Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum mendapatkan Nilai /Skor Kinerja untuk Penilaian Tahun 2024 dikarenakan Penilaian LPPD Masih dalam tahap Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Berikut adalah Status kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut :

Sumber : Permendagri No 18 Tahun 2020.

2. Persentase kerjasama yang terealisasi 100% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa semua program atau inisiatif kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat telah berhasil dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan rencana. Ini mencerminkan tingkat komitmen, koordinasi, dan efektivitas yang tinggi antarpihak yang terlibat, serta berpotensi memberikan manfaat besar dalam pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman.

Ada 10 Kesepakatan Bersama (MoU) yang telah terlaksana antara:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik perihal Jejaring Pengampuan Pelayanan di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik perihal Jejaring Pengampuan Layanan Diabetes Melitus dan Gastrohepatologi.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi perihal Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia perihal Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Sumatera Utara.
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk perihal Kerja Sama Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Peningkatan Layanan Publik Dan Penataan Transportasi Melalui Aplikasi Gojek Di Provinsi Sumatera Utara.
6. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Gadjah Mada perihal Kerja

Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Di Provinsi Sumatera Utara.

7. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal Kerja Sama Pembangunan Daerah.
8. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara perihal Percepatan Penurunan Stunting serta Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
9. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara perihal Percepatan Penurunan Stunting serta Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
10. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara perihal Percepatan Penurunan Stunting serta Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Terjalannya 48 Perjanjian Kerjasama (PKS) antara :

1. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara perihal Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktoral Studi Pembangunan.
2. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara perihal Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Doktoral Perencanaan Wilayah.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal Program Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
5. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan.
8. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal Peningkatan Pelayanan Manajemen Kepegawaian Melalui Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi.
9. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

10. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal Pembangunan Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan.
11. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
12. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal Fasilitasi Pengembangan Pertanian Sub Sektor Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
13. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
14. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal Penanaman Modal.
15. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perihal Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Konsumen Pengguna di Provinsi Sumatera Utara.
16. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Kabupaten Asahan perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
17. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Kabupaten Karo perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
18. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
19. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
20. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
21. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias Barat perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
22. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
23. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
24. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
25. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Gunungsitoli perihal

- Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
26. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 27. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Pematangsiantar perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 28. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 29. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Dairi perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 30. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 31. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 32. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Langkat perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 33. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 34. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 35. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 36. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 37. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 38. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Samosir perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 39. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 40. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Simalungun perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 41. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 42. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

- perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
43. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Toba perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 44. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Binjai perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 45. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 46. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Sibolga perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 47. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Tanjungbalai perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 48. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi perihal Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen.

Uraian penjelasan tabel Biro Hukum:

Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah, dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu: 1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi, target 40 Perda/Pergub realisasi 43 Perda/Pergub dan capaian 107,5%, 2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi, target 450 Perda/Perkada realisasi 528 Perda/Perkada dan capaian 117,3%, 3. Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi, target 700 produk hukum realisasi 909 produk hukum dan capaian 129,8%, dan 4. Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu, target 40 Perda/Pergub realisasi 43 Perda/Pergub dan capaian 107,5%.

Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu: 1. Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan, target 25 perkara realisasi 38 perkara dan capaian 152%, dan 2. Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, target 15 kasus/masalah realisasi 23 kasus/masalah dan capaian 153,3%.

Uraian penjelasan tabel Biro Perekonomian:

Indikator Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan ini terealisasi 100.00% sedangkan indikator Persentase BUMD dan BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat terealisasi sebanyak 57,14%.

Pencapaian indikator Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan dihitung dengan formula kebijakan yang diimplementasikan dibagi dengan jumlah kebijakan yang dihasilkan dikali 100 %. Adapun kebijakan yang dihasilkan dan telah diimplementasikan oleh kab/kota maupun OPD terkait antara lain:

1. Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/121/KPTS/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Utara;
3. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/256/KPTS/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Program Kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/404/KPTS/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Forum Koordinasi Tenggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta di Provinsi Sumatera Utara;
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan HET LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Sumatera Utara, dengan kenaikan harga di tingkat Agen dari Rp. 14.000 menjadi Rp. 15.000, dan di tingkat Pangkalan dari Rp. 16.000 menjadi Rp. 17.000/tabung;
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/565/KPTS/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Tarif Air Limbah Domestik Non Perpipaan Kepala Pelaku Usaha dan atau Kegiatan di Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi;
7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/895/KPTS/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prog Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara;
8. Surat Edaran Gubernur terkait penanaman bibit cabai merah dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino di Sumatera Utara nomor 500.6/7206 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023.

Implementasi kebijakan tersebut diperoleh dari laporan kab/kota maupun OPD yang terkait langsung dengan kebijakan tersebut.

Uraian penjelasan tabel Biro Pengadaan Barang dan Jasa :

1. Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa

Jumlah pelayanan pengadaan barang dan jasa berdasarkan usulan OPD melalui Rencana Pemilihan Penyedia (RPP) yang disampaikan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetaprovSU pada tahun 2023 sebanyak 269 paket dari 19 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui metode tender/seleksi/tender cepat dengan rincian pada lampiran 7.

2. Target pembinaan terhadap 7 Kabupaten/Kota untuk mencapai 17 Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdiri dari :

- 1) Sertifikat kebijakan layanan.
- 2) Sertifikat pengorganisasian layanan
- 3) Sertifikat pengelolaan aset layanan
- 4) Sertifikat pengelolaan risiko layanan
- 5) Sertifikat pengelolaan layanan helpdesk
- 6) Sertifikat pengelolaan perubahan
- 7) Sertifikat pengelolaan kapasitas
- 8) Sertifikat pengelolaan sumber daya manusia
- 9) Sertifikat pengelolaan keamanan perangkat
- 10) Sertifikat pengelolaan keamanan operasional layanan
- 11) Sertifikat pengelolaan keamanan server dan jaringan
- 12) Sertifikat pengelolaan kelangsungan layanan
- 13) Sertifikat pengelolaan anggaran layanan
- 14) Sertifikat pengelolaan pendukung layanan
- 15) Sertifikat pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan
- 16) Sertifikat pengelolaan kepatuhan
- 17) Sertifikat penilaian internal

Target 2 Kabupaten/Kota untuk mencapai 17 Standar LPSE telah terlaksana pada :

1. Kota Pematang Siantar
2. Kota Padangsidimpuan

Uraian penjelasan tabel Biro Administrasi Pembangunan :

Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu merupakan sebuah hasil kinerja yang telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2024. Hasil dari Capaian Kinerja Tahun 2024, dimana pada Indikator I yaitu Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Daerah Dimana pada Pelaksanaan Indikator ini Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sudah mengeluarkan beberapa Kebijakan yang diperuntukkan oleh Perangkat Daerah. Adapun Kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Biro Administrasi Pembangunan sudah disampaikan kepada Biro Otonomi dan Pemerintahan Daerah sebagai Bahan LKPJ dan LPPD Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

Untuk Indikator II yaitu Persentase Realisasi Fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi, Dimana di awal Tahun Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sudah menyurati Perangkat Daerah untuk mengirimkan data Admin yang sudah ditunjuk yang bertugas untuk Penginputan Realisasi Anggaran Fisik dan Non Fisik pada Aplikasi PRP2SUMUT. Pada Akhir 2024 setelah melakukan evaluasi terhadap Aplikasi PRP2SUMUT masih ada beberapa Perangkat Daerah yang belum mengisi realisasi fisik dan Non Fisik pada Aplikasi PRP2SUMUT. Dari 42 Perangkat Daerah ada sekitar 8 Perangkat Daerah yang sama sekali belum melengkapi 100% realisasi fisik dan non fisik pada Aplikasi PRP2SUMUT.

Uraian penjelasan tabel Biro Organisasi :

Sasaran strategis Biro Organisasi adalah meningkatkan nilai reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan 3 (tiga) target Indikator Kinerja telah direalisasikan dengan tingkat capaian pada indikator kinerja persentase kelembagaan perangkat daerah sebesar 100 %, Indeks pelayanan publik dengan capaian sebesar 90.70%, dan nilai capaian pelaporan kinerja dengan capaian sebesar 97.45%.

Uraian penjelasan tabel Biro Umum :

Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan dengan Target 100% dengan Realisasi 100% dan Capaian 100%. Beberapa kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan Daerah yang dilayani adalah Belanja Cendramata Belanja Dekorasi Belanja Bunga Hias Fasilitasi Makan Minum Rapat Fasilitasi Makan Minum Jamuan Tamu Fasilitasi

Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Sewa Genset Sewa Alat Pendingin Sewa Meja Kursi Sewa Tenda Sewa Peralatan Audio.

Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess PemprovSU dengan Indikator Kinerja Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess PemprovSU dengan Target 100% dengan Realisasi 80,29% dan Capaian 80,29%. Tidak tercapainya target disebabkan sepanjang Tahun 2024 adanya dilakukan kegiatan pemeliharaan pada mess-mess di lingkungan SetdaprovSU dalam pengerjaannya terdapat beberapa kamar yang tidak dapat difungsikan. Berikut beberapa Gedung dan Mess PemprovSU adalah Convention Hall, Parapat Mess, Barus Mess Balige, Mess Gundaling Brastagi, Mess Haranggaol, Mess Harunguan Bolon, Mess Kotanopan, Mess Marihat Parapat, Mess Muara Sipongi, Mess Muara Soma, Mess Natal, Mess Nias/G.Sitoli, Mess Panyabungan, Mess Parsoburan, Mess Pd.Sidempuan, Mess Rantau Prapat, Mess Sempurna Brastagi, Mess Sibolga, Mess Sibuhuan, Mess Sidikalang, Mess Sipirok, Mess Tanjung Balai, Mess Tarutung, Mess Pora-Pora Parapat, Aek Rengat Samosir dan Mess Tarukim.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah							
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,4	2,9	2,7	Hasil Masih dalam Evaluasi Kemendagri	100%
2.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Persentase kerjasama yang terealisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Biro Kesejahteraan Rakyat							
3.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Persentase proposal hibah yang ditindaklanjuti	92%	90%	75%	Rp. 3.956.270.749	84,57%
		Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	92%	90%	75%	Rp. 344.524.018.25	73,05%
Biro Hukum							
4.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	60 Perda/ Pergub	65 Perda/ Pergub	40 Perda/ Pergub	43 Perda/ Pergub	107,5 %

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/ masalah	14 Kasus/ masalah	15 Kasus/ masalah	23 Kasus/ masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
7.	Mewujudkan Proses dan pelayanan/ Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	836 paket	269 paket	201 paket	201 paket	100%

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/masalah	14 Kasus/masalah	15 Kasus/masalah	23 Kasus/masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
	transparan, akuntabel dan terstandar	Pemenuhan 17 Standarisasi LPSE	17 Standar	17 Standar	2 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	100%
Biro Administrasi Pembangunan							

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/masalah	14 Kasus/masalah	15 Kasus/masalah	23 Kasus/masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
8.	Menciptakan Kebijakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian	25 Dokumen	18 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/masalah	14 Kasus/masalah	15 Kasus/masalah	23 Kasus/masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
		Administrasi Pelaksanaan Daerah					

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/masalah	14 Kasus/masalah	15 Kasus/masalah	23 Kasus/masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
		Persentase Realisasi Fisik dan non fisik perangkat daerah yang	93%	95%	95 %	97%	95%

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/masalah	14 Kasus/masalah	15 Kasus/masalah	23 Kasus/masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
		menyampaikan laporan melalui aplikasi					

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/ masalah	14 Kasus/ masalah	15 Kasus/ masalah	23 Kasus/ masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
Biro Organisasi							
9.	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi	Persentase Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/ masalah	14 Kasus/ masalah	15 Kasus/ masalah	23 Kasus/ masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran					

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/ masalah	14 Kasus/ masalah	15 Kasus/ masalah	23 Kasus/ masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
		Indeks Pelayanan Publik	3.99	3.51	4.30	3.90	90.70%
		Nilai capaian pelaporan kinerja	11.25	11.45	11.75	11.45	97.45%

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/masalah	14 Kasus/masalah	15 Kasus/masalah	23 Kasus/masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
Biro Umum							

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/masalah	14 Kasus/masalah	15 Kasus/masalah	23 Kasus/masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
10.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/masalah	14 Kasus/masalah	15 Kasus/masalah	23 Kasus/masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
		Kerumahtanggaan Pimpinan					

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/ masalah	14 Kasus/ masalah	15 Kasus/ masalah	23 Kasus/ masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
11.	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprovsu	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan	91,17%	92,39%	100%	80,29%	80,29%

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/ masalah	14 Kasus/ masalah	15 Kasus/ masalah	23 Kasus/ masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
		Gedung dan Mess Pemprovsu					
Biro Administrasi Pimpinan							

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/ masalah	14 Kasus/ masalah	15 Kasus/ masalah	23 Kasus/ masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
12.	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan	Persentase fasilitasi materi pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/masalah	14 Kasus/masalah	15 Kasus/masalah	23 Kasus/masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
	pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu	100%	100%	100%	100%	100%

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	850 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 Kasus/ masalah	14 Kasus/ masalah	15 Kasus/ masalah	23 Kasus/ masalah	153 %
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	71,46%	57,14%	50%	50%	100%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	n/a	n/a	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
		utama Pemerintah Daerah					

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis 2024	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah					
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Hasil Masih dalam Evaluasi Kemendagri	3,4	-
2.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Persentase kerjasama yang terealisasi	100%	100%	100%
Biro Kesejahteraan Rakyat					
3.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Persentase proposal hibah yang di tindaklanjuti	84,57%	75%	63%
		Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	73,05%	75%	43%
Biro Hukum					
4.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	43 Perda/ Pergub	40 Perda/ Pergub	107,5 %

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	528 Perda/Perkada	450 Perda/Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	909 produk hukum	700 Produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	43 produk hukum	40 Produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	38 perkara	25 Perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	23 Kasus/masalah	15 Kasus/masalah	153 %
Biro Perekonomian					
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	50%	100%	50%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa					
7.	Mewujudkan Proses dan pelayanan/ Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang transparan, akuntabel dan terstandar	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%
		Pemenuhan 17 Standarisasi LPSE	100%	100%	100%
Biro Administrasi Pembangunan					
8.	Menciptakan Kebijakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %
		Persentase Realisasi Fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	95 %	95.8 %	102 %
Biro Organissasi					
9.	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	100%	100%
		Indeks Pelayanan Publik	3.90	4.30	90.70%
		Nilai capaian pelaporan kinerja	11.45	11.75	97.45%
Biro Umum					
10.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah		100%	100%	100%

		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	528 Perda/Perkada	450 Perda/Perkada	117,3 %
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	909 produk hukum	700 Produk hukum	129,8 %
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	43 produk hukum	40 Produk hukum	107,5 %
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	38 perkara	25 Perkara	152 %
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	23 Kasus/masalah	15 Kasus/masalah	153 %
Biro Perekonomian					
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%	100%	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	50%	100%	50%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	100%	100%	100%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa					
9.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan	100%	100%	100%
10	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprovsu	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu	80,29%	100%	80,29%
Biro Administrasi Pimpinan					
10.	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi materi pimpinan	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%	100%	100%

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah					
NIHIL					
Biro Kesejahteraan Rakyat					
NIHIL					
Biro Hukum					
NIHIL					
Biro Perekonomian					
NIHIL					
Biro Pengadaan Barang dan Jasa					
NIHIL					
Biro Administrasi Pembangunan					
	Menciptakan Kebijakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Daerah	18 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada
		Persentase Realisasi Fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	95%	Tidak ada	Tidak ada
NIHIL					
Biro Organisasi					
NIHIL					
Biro Umum					
	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan	100%	Tidak ada	Tidak ada
	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	80,29%	Tidak ada	Tidak ada
Biro Administrasi Pimpinan					
	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi materi pimpinan	100%	Nihil	Tidak ada
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%	Nihil	Tidak ada

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah							
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,7	Hasil Masih di Evaluasi	100%	Keberhasilan : Peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya. Mencapai tujuan strategis yang ditetapkan. Peningkatan layanan publik. Pengakuan eksternal terhadap upaya pemerintah. Kegagalan: Penurunan kinerja dari tahun sebelumnya. Kegagalan mencapai tujuan strategis yang ditetapkan. Penurunan kualitas atau aksesibilitas layanan publik. Kritik eksternal terhadap kinerja pemerintah	Peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan. Perbaikan kebijakan dan program yang tidak efektif. Pelatihan dan pengembangan SDM untuk pegawai pemerintah. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Evaluasi dan pemantauan kinerja secara rutin. Kolaborasi dengan pihak eksternal untuk mendukung implementasi kebijakan. Resolusi konflik secara konstruktif melalui mekanisme yang efektif.

2.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Persentase kerjasama yang terealisasi	100%	100%	100%	Keberhasilan: Pencapaian target kerjasama yang mendekati atau mencapai 100%. Peningkatan atau kesinambungan dari tahun sebelumnya. Manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat Kegagalan : Persentase kerjasama yang terealisasi jauh dari target atau rendah. Keterputusan atau fluktuasi yang signifikan. Ketidakseimbangan manfaat antara pihak-pihak yang terlibat.	Peningkatan komunikasi dan koordinasi. Perbaikan perencanaan dan manajemen proyek. Penetapan target yang realistis. Penguatan kerangka kerja hukum. Pelatihan dan pengembangan kapasitas. Evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Pengembangan kemitraan yang lebih kokoh.
Biro Kesejahteraan Rakyat							
3.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Persentase proposal hibah yang di tindaklanjuti	75%	84,57%	84,57%	Keberhasilan: Meningkatnya Kualitas Tata kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Meningkatnya Kinerja Birokrasi. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegagalan: Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi terhadap lembaga yang menerima bantuan Terbatasnya anggaran dalam menampung aspirasi masyarakat dalam pengajuan hibah Masih belum maksimal dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal dan SOP	
		Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	75%	73,05%	73,05%	Keberhasilan: Tersalurnya bantuan hibah seluruh penerima hibah baik itu Lembaga, Yayasan, Rumah Ibadah dan Sekolah maupun penerima beasiswa dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegagalan: Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi terhadap lembaga yang menerima bantuan Terbatasnya anggaran dalam menampung aspirasi masyarakat dalam pengajuan hibah. Terbatasnya waktu atau proses pencairan di akhir tahun	
Biro Hukum							

4.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	43 Perda/ Pergub			-	-
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	528 Perda/ Perkada			-	-
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	909 produk hukum			-	-
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	43 produk hukum			-	-
5.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan	Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	38 perkara			-	-
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	23 Kasus/ masalah			-	-

	Pemprov dan Masyarakat.						
Biro Perekonomian							
6.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasi kan				Melaksanakan koordinasi dan rapat dengan kab/kota, perangkat daerah maupun instansi vertikal yang terkait Alokasi dana yang cukup dalam pelaksanaan program	Rutin melaksanakan rapat internal serta koordinasi guna evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat				Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap BUMD terhadap capaian kerjanya	melakukan pembinaan, evaluasi dan pergantian direksi BUMD yang kinerja tidak mencapai target sesuai Key Performance Indicator (KPI)
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi				Melakukan evaluasi terhadap penetapan UPTD menjadi BLUD	Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap proses penetapan BLUD
Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
7.	Mewujudkan Proses dan pelayanan/ Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang transparan, akuntabel dan terstandar	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	201 paket	201 paket	100%	Keberhasilan: Proses pemilihan penyedia melalui metode tender cepat, tender dan seleksi telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Kegagalan: Rendahnya penyelesaian paket pekerjaan e-Purchasing melalui katalog elektronik dan pengisian e-Kontrak serta pencatatan non-tender dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sehingga mempengaruhi nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2024	Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menugaskan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penyelesaian paket pekerjaan e-Purchasing melalui katalog elektronik dan pengisian e-Kontrak serta pencatatan non-tender dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
		Pemenuhan 17 Standarisasi LPSE	2 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	100%	Keberhasilan: Komitmen yang cukup tinggi dari Pemerintah Kab/Kota untuk pemenuhan 17 Standarisasi LPSE Kegagalan: Keterbatasan anggaran pada pemerintah Kab/Kota untuk sarana dan prasarana dalam	Pemerintah Kab/Kota agar mengalokasi anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung 17 Standarisasi LPSE

						pemenuhan 17 Standarisasi LPSE	
Biro Administrasi Pembangunan							
8.	Menciptakan Kebijakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %	Keberhasilan dalam pelaksanaan Indikator ini terlaksanakan karena Perangkat Daerah dalam Penyampaian Draft Kebijakan	
		Persentase Realisasi Fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	97 %	95 %	102 %	Kegagalan dalam pelaksanaan Indikator ini terjadi karena kurangnya peduli nya admin pada Perangkat Daerah untuk menyampaikan pada Aplikasi	Menyurati Perangkat Daerah sebagai Teguran dalam penyampaian pada PRP2SUMUT
Biro Organisasi							
9.	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	100%	100%	Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan SE Menteri PAN dan RB Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.	Penataan Perangkat Daerah untuk menyesuaikan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi yang akan ditetapkan dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
		Indeks Pelayanan Publik	4.30	3.90	90.70%	Hasil indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan unit kerja yang dievaluasi dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019-2022, unit kerja yang dievaluasi adalah Dinas PM-PTSP dan UPTD, sedangkan Tahun 2023 adanya perubahan unit kerja yang dievaluasi yaitu Dinas Sosial, UPTD Samsat Binjai dan UPTD Khusus RSU. Haji Medan.	Dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
		Nilai capaian pelaporan kinerja	11.75	11.45	97.45%	Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang	Melakukan pembinaan dan asistensi penyusunan

						sistematika penyusunan laporan kinerja.	laporan kinerja perangkat daerah.
Biro Umum							
10.	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	100%	100%	100%	Kegiatan pimpinan Daerah yang bersifat Dinamis	Melakukan Monitoring dan Evaluasi, Melakukan Pembentukan Tim Kerja dan pelaksanaan FGD
11.	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	100%	80,29%	80,29%	keterbatasan jumlah kamar disebabkan adanya kegiatan pemeliharaan pada mess	Melakukan Evaluasi Berkala dan Penetapan Kebijakan
Biro Administrasi Pimpinan							
12.	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas materi pimpinan	100%	100%	100%	Keberhasilan: Koordinasi dan sinergisitas yang baik	Membangun koordinasi dan sinergisitas dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Lembaga/ Instansi Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta dan masyarakat
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Keberhasilan: Penyelenggaraan kegiatan acara pimpinan sehingga dapat berjalan tertib dan lancar	Adanya standarisasi dalam penyelenggaraan kegiatan acara pimpinan

Uraian penjelasan tabel Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah :

- a. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):
 - Kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah.
 - Keterbatasan sumber daya atau kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang efektif.
 - Kurangnya transparansi atau akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
- b. Persentase Kerjasama yang Terealisasi:
 - Perbedaan kepentingan atau prioritas antarpihak yang terlibat.
 - Ketidakmampuan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang diperlukan.
 - Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antarpihak.

Uraian penjelasan tabel Biro Kesejahteraan Rakyat:

- a. Proposal yang ditindaklanjuti
- b. Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti

Uraian penjelasan tabel Biro Pengadaan Barang dan Jasa :

- c. Pelayanan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 201 paket telah selesai diproses pemilihan penyedia melalui metode tender/seleksi/tendar cepat sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam RPP oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU melalui Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) sebagaimana tersaji pada lampiran tabel 3.7. Selain keberhasilan dalam menyelesaikan proses pemilihan penyedia terdapat faktor penghambat yaitu rendahnya penyelesaian paket pekerjaan e-Purchasing melalui katalog elektronik dan pengisian e-Kontrak serta pencatatan non-tender dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sehingga mempengaruhi nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2024. Solusi yang dilakukan terhadap faktor penghambat adalah Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menugaskan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penyelesaian paket pekerjaan e-Purchasing melalui katalog elektronik dan pengisian e-Kontrak serta pencatatan non-tender dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- d. Target pembinaan terhadap 2 Kabupaten/Kota untuk mencapai 17 Standar LPSE dapat terealisasi disebabkan komitmen yang cukup tinggi dari Pemerintah Kab/Kota untuk pemenuhan 17 Standarisasi LPSE yaitu Kota Pematang Siantar dan Kota Padangsidimpuan. Selain keberhasilan dalam pembinaan terhadap 2 Kabupaten/Kota terdapat faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran pada pemerintah Kab/Kota untuk sarana dan prasarana dalam pemenuhan 17 Standarisasi LPSE. Solusi yang dilakukan terhadap faktor penghambat adalah Pemerintah Kab/Kota agar mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung 17 Standarisasi LPSE.

Uraian penjelasan tabel Biro Administrasi Pembangunan:

Dalam sebuah pelaksanaan kinerja sebuah perangkat daerah selalu memiliki keberhasilan /kegagalan yang menjadikan sebuah evaluasi pada Perangkat Daerah masing-masing. Dalam Pelaksanaan Indikator yang sudah disusun oleh Biro Administrasi Pembangunan bahwasanya ada Keberhasilan / Kegagalan yang terjadi. Dimana pada Indikator ke 2 Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU ada Kegagalan yang terjadi akibat kurang peduli Admin yang sudah di pilih oleh Perangkat Daerah untuk melakukan Penginputan pada Aplikasi PRP2SUMUT.

Uraian penjelasan tabel Biro Organisasi :

Capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran tahun 2024 tercapai 100%. Hal ini menunjukkan realisasi tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi mengupayakan Perangkat Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan beban kerja utama. Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Uraian penjelasan tabel Biro Umum :

Analisis Keberhasilan, kegagalan dan solusi pada sasaran strategis Biro Umum SetdaprovSU yakni Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah terealisasi dengan baik karena beberapa solusi yang dijalankan seperti Melakukan Monitoring dan Evaluasi, Melakukan Pembentukan Tim Kerja dan pelaksanaan FGD. Pada sasaran strategis Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess PemprovSU terjadinya kendala berupa keterbatasan jumlah kamar disebabkan adanya kegiatan pemeliharaan pada Gedung dan Mess PemprovSU sehingga beberapa kamar tidak dapat difungsikan, sehingga solusi yang dapat diberikan adalah Melakukan Evaluasi Berkala dan Penetapan Kebijakan guna untuk meningkatkan capaian realisasi untuk tahun berikutnya.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja Biro Umum SetdaprovSU adalah:

- Kurangnya tenaga aparatur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- Pengelolaan data lengkap tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
- Belum maksimalnya fasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Biro Umum SetdaprovSU.
- Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi dan kurang memahami tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
- Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga tidak tepat waktu.
- Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal
- Kuota plafon RAPBD dari TAPD yang terbatas.
- Fluktuasi kegiatan pimpinan yang sulit diprediksi

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah								
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,7	Hasil Masih dalam Evaluasi Kemendagri	100 %	515.565.750	506.423.050	98,2 %	1,8%
2.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	100%	100%	100 %	570.968.891	564.860.972	98,9 %	1,1%
Biro Kesejahteraan Rakyat								
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	75%	348.290.289.007	73,12 %	476.333.677.071	348.290.289.007	73,12 %	10%
Biro Hukum								
5.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	40 Perda/ Pergub	43 Perda/ Pergub	107,5 %	570.540.515		99,82 %	0,00
		450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3 %	402.720.000		97,82 %	0,00

		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8%		82,67	0,00
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5 %		95,99	0,00
6.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	25 perkara	38 perkara	152,0 %		98,83	0,00
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	15 kasus	23 kasus	153,3 %		96,85	0,00
Biro Perekonomian								
7.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah			100%	1.128.757.142	1.108.048.510	98,16 %	1,84%
				100%	837.864.142	818.309.610	97,67%	2,33%
				100%	229.697.000	228.756.000	99,59%	0,41%

				100 %	61.196.000	60.982.400	99,65%	0,35%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa								
8.	Mewujudkan Proses dan pelayanan/ Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang transparan, akuntabel dan terstandar	100%	100%	100%	3.071.717.100	3.044.128.591	99,10 %	0,90 %
Biro Administrasi Pembangunan								
9.	Menciptakan Kebijakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Daerah	100%	100%	Rp 785.359.785	Rp 783.933.261	99,82 %	Rp 798.078.369
		Persentase Realisasi Fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	95%	95,58%	Rp 473.456.00	Rp 471.718.938	99,63 %	Rp 573.721.610
Biro Organisasi								
10.	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	100%	100%	351.738.000	351.505.214	99,93	0,07%
	Indeks Pelayanan Publik	4.30	3.90	90,70%	310.268.101	308.544.728	99,44	0,56%
	Nilai capaian pelaporan kinerja	11,75	11,45	97,45%	346.820.000	332.135.720	95,77	4,23%
Biro Umum								
11.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	100%	100%	104.291.028.369	71.536.469.963	68,59 %	32.754.558.406
12.	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	80,29%	80,29%	61.425.424.735	35.755.836.728	58,21 %	25.669.588.007
Biro Administrasi Pimpinan								
13.	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%	100%	100	14.157.150.928	13.135.398.019	92,78	7,22%

Uraian penjelasan Tabel Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah:

Indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan target sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sesuai yang ada pada table 3.6..

Uraian penjelasan Tabel Biro Kesejahteraan Rakyat:

Indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan target sebesar 75% dengan Realiasi 90% dan efisiensi anggaran sebesar 10%.

Uraian penjelasan Tabel penjelasan Biro Perekonomian:

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran, pada sasaran strategis Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah pada tahun 2021-2022 memiliki realisasi hingga 100% dan untuk tahun 2023 juga memiliki capaian hingga 100% sehingga dapat disimpulkan capaian tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya memiliki capaian yang stabil dan memiliki efisiensi anggaran yang baik. Sedangkan pada sasaran strategis Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprovsu capaian kinerja pada tahun 2023 memiliki penurunan capaian 92,39 % dan memiliki efisiensi anggaran senilai Rp. 4.105.032.334 (Empat Milyar Seratus Lima Juta Tuga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Uraian penjelasan Tabel Biro Pengadaan Barang dan Jasa:

Indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan target sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,90% setelah *recofusing* semula Rp.5.414.784.325,- menjadi Rp.3.071.717.100,- selisih (efisiensi) sebesar Rp.2.370.655.734,- (56,73%).

Uraian penjelasan Tabel Biro Administrasi Pembangunan:

Perbandingan Pada tahun 2024, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu melaksanakan program strategis dengan fokus pada Laporan pelaksanaan Pembangunan pada perangkat daerah.

Secara keseluruhan, program-program ini mencerminkan upaya Biro Administrasi Pembangunan dalam mengelola anggaran secara efisien sambil tetap memastikan pencapaian target kinerja. Hal ini menjadi bukti komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Uraian penjelasan Tabel Biro Umum:

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran, pada sasaran strategis Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah pada tahun 2021-2022 memiliki realisasi hingga 100% dan untuk tahun 2023 juga memiliki capaian hingga

100% sehingga dapat disimpulkan capaian tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya memiliki capaian yang stabil dan memiliki efisiensi anggaran yang baik. Sedangkan pada sasaran strategis Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprovsu capaian kinerja pada tahun 2023 memiliki penurunan capaian 92,39 % dan memiliki efisiensi anggaran senilai Rp. 4.105.032.334 (Empat Milyar Seratus Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Uraian penjelasan Biro Administrasi Pimpinan:

Pada sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah, persentase capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.770.703.442,- terealisasi sebesar Rp. 9.621.217.466,-. Dengan demikian, pencapaian kinerja pada sasaran strategis Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu dapat mengefisiensi anggaran sebesar Rp. 149.485.976,- (1.53%).

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah								
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	100%	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang	Program dan Kegiatan menunjang pencapaian indikator kinerja
2.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Persentase kerjasama yang terealisasi	100%	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	Menunjang	Program dan Kegiatan menunjang pencapaian indikator kinerja
Biro Kesejahteraan Rakyat								
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Persentase proposal hibah yang di tindaklanjuti	75%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	84,57 %	Menunjang	Program dan Kegiatan menunjang pencapaian indikator kinerja
		Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	75%	Program Kesejahteraan rakyat	Persentase proposal hibah yang di tindaklanjuti	73,05 %	Tidak Menunjang	Program dan Kegiatan tidak menunjang pencapaian indikator kinerja

Biro Hukum								
5.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.		Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.		Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.		Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.		Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.		Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.		Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
6.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.		Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.		Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai

Biro Perekonomian								
7.	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang diimplementasikan	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan				Program dan Kegiatan menunjang pencapaian indikator kinerja
				Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			Kegiatan ini menunjang dari segi kebijakan terkait pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, percepatan akses keuangan daerah dan ekonomi keuangan dan syariah	
				Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			Kegiatan ini menunjang dari segi kebijakan terkait pertanian, lingkungan hidup serta sumber daya energi dan air	
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	100%	Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			Kegiatan ini menunjang dari segi pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD dalam peningkatan Kesehatan BUMD	Program dan Kegiatan menunjang pencapaian indikator kinerja
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	100%	Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			Kegiatan ini menunjang dari segi pelaksanaan terhadap peningkatan kinerja BLUD	Program dan Kegiatan menunjang pencapaian indikator kinerja
Biro Pengadaan Barang dan Jasa								
8.	Mewujudkan Proses dan pelayanan/ Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang transparan, akuntabel dan terstandar	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	100%	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah tender/seleksi yang diselesaikan	100%	Menunjang	Program dan Kegiatan menunjang pencapaian indikator kinerja
		Pemenuhan 17 Standarisasi LPSE	100%	Pengelolaan Sistem Pengadaan	Jumlah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang	Program dan Kegiatan menunjang

				Secara Elektronik	yang mencapai 17 standar LPSE			pencapaian indikator kinerja
Biro Administrasi Pembangunan								
9.	Menciptakan Kebijakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Daerah	20 Dokumen	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan/ Pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	20 Dokumen	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
		Persentase Realisasi Fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	95 %	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan/ Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	95.58%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
Biro Organisasi								
10.	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	Program Penataan Organisasi Kegiatan: Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	Menunjang	Capaian indikator kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 tercapai 100%.
		Indeks Pelayanan Publik	90.70%	Program Penataan Organisasi Kegiatan: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Pelayanan Publik	90.70%	Menunjang	Pada tahun 2024, target indeks pelayanan publik adalah 4.30. hasil evaluasi pelayanan publik dari Kementerian PAN dan RB tahun 2024 adalah 3.90. hal ini menunjukkan bahwa untuk realisasi tidak mencapai target.
		Nilai capaian pelaporan kinerja	97.45	Program Penataan Organisasi Kegiatan: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai capaian pelaporan kinerja	97.45	Menunjang	Untuk tahun 2024, nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan target 11.75, sedangkan nilai pada Tahun 2024 adalah 11.45. hal ini menunjukkan bahwa realisasi tidak mencapai target.

Biro Umum								
11.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
12.	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	92,39%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi /Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi /Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi /Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi /Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi /Administrasi Keuangan dan	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai

				<i>Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi /Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
				Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa /Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
Biro Administrasi Pimpinan								
13.	Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi materi pimpinan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase materi dan komunikasi pimpinan	100%	Menunjang	Program dan Kegiatan menunjang pencapaian indikator kinerja
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				
	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase fasilitasi keprotokolan	100%	Menunjang		
			Fasilitasi Keprotokolan					

Uraian penjelasan Tabel Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah:

Program dan kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang ditampung dalam DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU Tahun 2024 merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan capaian indikator kinerja sebesar 100%

Uraian penjelasan Biro Kesejahteraan Rakyat:

Program dan kegiatan Pelaksanaan pada Bagian Bina Mental Spiritual, Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bagian Kesejahteraan Pelayanan Dasar

yang ditampung dalam DPA Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU Tahun 2024 merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan capaian indikator kinerja.

Uraian penjelasan Biro Perekonomian:

Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian target IKU antara lain:

1. Sarana dan Prasarana berupa jaringan, komputer dan pendukung lainnya yang sudah lengkap.
2. Komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
3. Sumber Daya Aparatur yang disiplin
4. Dukungan dana yang cukup

Adapun kendala yang dihadapi Biro Perekonomian Setda Provsu dalam pencapaian target IKU antara lain:

1. Integrasi data yang belum memadai. Banyaknya data yang belum terintegrasi baik data dari kabupaten/kota maupun instansi lainnya seperti data terkait realisasi peta jalan pengendalian inflasi yang belum dengan baik diimplementasikan.
2. Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya. Masih banyak ASN Biro Perekonomian yang belum sesuai penempatannya dengan bidang Pendidikan dan tugas fungsi yang dilaksanakan.
3. Masih kurangnya SDM di Biro Perekonomian baik dari segi pejabat fungsional maupun pelaksana. Masih banyaknya fungsional yang belum ditempatkan dengan baik di Biro Perekonomian.
4. Kurang optimalnya prosedur kerja dan tata kerja. Tidak adanya prosedur dan tata kerja yang baik di Biro Perekonomian.

Program Perekonomian dan Pembangunan yang ditampung dalam DPA Biro Perekonomian Tahun 2024 merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan capaian indikator kinerja rata-rata 98,17%.

Uraian penjelasan Biro Pengadaan Barang dan Jasa:

Program dan kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Sistem Pengadaan secara elektronik yang ditampung dalam DPA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provsu Tahun 2024 merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan capaian indikator kinerja sebesar 100%.

Uraian penjelasan Biro Administrasi Pembangunan:

Berdasarkan Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, berbagai program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Salah satu sasaran

utama adalah Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Daerah. Selain itu, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan juga menjadi pendukung dalam pelaksanaan pendorong Indikator Kinerja Utama dalam pelaksanaan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
1.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	574.872.806	572.414.296	99,6%
2.	Pelaksanaan Otonomi Daerah	2.139.518.450	2.100.479.536	98,2%
3.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	570.968.891	564.860.972	98,9%
Biro Kesejahteraan Rakyat				
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 4.678.223.866	Rp. 3.956.270.749	84,57%
5.	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 471.655.453.205	Rp. 344.524.018.258	73,05%

Biro Hukum				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.166.468	522.754.269	98,79
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.913.468	153.526.131	99,75
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84.639.468	84.262.131	99,55
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.010.000	2.000.000	99,50
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.264.000	50.264.000	100,00
	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17.000.000	17.000.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.265.000	10.264.600	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.265.000	10.264.600	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364.988.000	358.963.538	98,35
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000	9.750.000	97,50
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	354.988.000	349.213.538	98,37
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.904.100	171.204.100	96,78
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.526.500	95.000	6,22
	Belanja Paket/Pengiriman	1.526.500	95.000	6,22
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0	0	0,00
	Belanja Modal Personal Computer	0	0	0,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.377.600	171.109.100	97,57
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	168.000.000	164.500.000	97,92
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.855.600	6.141.475	89,58
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	522.000	467.625	89,58
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.000.000	8.000.000	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	8.000.000	100,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	8.000.000	8.000.000	100,00
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.038.773.551	2.026.671.868	99,41
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	955.484.751	943.383.068	98,73
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	320.867.250	308.765.567	96,23
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.442.250	3.442.250	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	48.000.000	36.000.000	75,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	269.425.000	269.323.317	99,96
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	28.100.000	28.100.000	100,00

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.050.000	6.050.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.590.000	8.590.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.060.000	8.060.000	100,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	5.400.000	100,00
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	258.927.501	258.927.501	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.845.000	19.845.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.851.200	8.851.200	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.730.000	18.730.000	100,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.200.000	12.200.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	856.900	856.900	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.565.801	1.565.801	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	45.500.000	45.500.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	58.500.000	58.500.000	100,00
	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0	0	0,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0	0	0,00
	Belanja Paket/Pengiriman	0	0	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.605.100	3.605.100	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN	274.500	274.500	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.733.000	64.733.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.400.000	23.400.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	866.000	866.000	100,00
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	347.590.000	347.590.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.630.000	3.630.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.200.000	5.200.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.590.000	7.590.000	100,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.600.000	15.600.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	315.570.000	315.570.000	100,00
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.083.288.800	1.083.288.800	100,00
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	551.866.900	551.866.900	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.619.900	6.619.900	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000	3.000.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0,00

	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	0	0	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	144.000.000	144.000.000	100,00
	Belanja Registrasi/Keanggotaan	8.000.000	8.000.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	390.247.000	390.247.000	100,00
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	531.421.900	531.421.900	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.800.000	8.800.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.346.900	13.346.900	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.736.000	42.736.000	100,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.300.000	33.300.000	100,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	141.250.000	141.250.000	100,00
	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	0	0	0,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0	0,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	291.989.000	291.989.000	100,00
	TOTAL	2.907.876.119	2.877.477.847	98,95
Biro Perekonomian				
	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	1.128.757.142	1.108.048.510	98,17%
	a. Program Perekonomian dan Pembangunan	1.128.757.142	1.108.048.510	98,17%
	a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	548.296.142	530.157.750	96,69%
	a. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	147.284.000	147.096.100	99,87%
	b. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	401.012.142	383.061.650	95,25%
	b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	289.568.000	288.151.860	99,51%
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	124.492.000	124.283.260	99,83%
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	98.144.000	97.187.000	99,02%
	c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	66.932.000	66.681.600	99,63%
	c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	290.893.000	289.738.900	99,60%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	137.689.000	137.150.600	99,61%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	92.008.000	91.605.900	99,56%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	61.196.000	60.982.400	99,65%
Biro Pengadaan Barang dan Jasa				

	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	404.127.310	401.910.757	99,45%
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2.667.589.790	2.642.217.834	99,05%
Biro Administrasi Pembangunan				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 1.316.205.986	Rp1.286.389.739	97,73%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Rp 126.840.000	Rp 102.300.000	80,65%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 126.840.000	Rp 102.300.000	80,65%
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Rp 104.200.000	Rp 101.460.000	97,37%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp 104.200.000	Rp 101.460.000	97,37%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp0	Rp0	0,00%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp 539.239.474	Rp 537.307.027	99,64%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 101.612.440	Rp 101.371.000	99,76%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 54.060.284	Rp 53.900.000	99,70%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 60.501.750	Rp 58.975.000	97,48%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 323.065.000	Rp 323.061.027	100%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Rp 518.672.712	Rp 518.672.712	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 518.672.712	Rp 518.672.712	100%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Rp 27.253.800	Rp 26.650.000	97,78%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 27.253.800	Rp 26.650.000	97,78%
	<i>Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</i>	Rp 1.258.815.785	Rp 1.255.652.199	99,75%
	<i>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	Rp785.359.785	Rp 783.933.261	99,82%
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp 281.537.945	Rp 280.725.623	99,71%
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp 226.709.000	Rp 226.700.898	100%
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp 277.112.840	Rp 276.506.740	99,78%
	<i>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	Rp 473.456.000	Rp 471.718.938	99,63%
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp 254.901.000	Rp 253.303.138	99,37%
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 146.0004.000	Rp 145.947.300	99,96%
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp 72.551.000	Rp 72.468.500	99,89%
	Jumlah	Rp 2.575.021.771	Rp 2.542.041.938	98,72%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 1.316.205.986	Rp1.286.389.739	97,73%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Rp 126.840.000	Rp 102.300.000	80,65%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 126.840.000	Rp 102.300.000	80,65%
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Rp 104.200.000	Rp 101.460.000	97,37%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp 104.200.000	Rp 101.460.000	97,37%

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp0	Rp0	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 539.239.474	Rp 537.307.027	99,64%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 101.612.440	Rp 101.371.000	99,76%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 54.060.284	Rp 53.900.000	99,70%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 60.501.750	Rp 58.975.000	97,48%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 323.065.000	Rp 323.061.027	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 518.672.712	Rp 518.672.712	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 518.672.712	Rp 518.672.712	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 27.253.800	Rp 26.650.000	97,78%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 27.253.800	Rp 26.650.000	97,78%
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp 1.258.815.785	Rp 1.255.652.199	99,75%
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 785.359.785	Rp 783.933.261	99,82%
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp 281.537.945	Rp 280.725.623	99,71%
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp 226.709.000	Rp 226.700.898	100%
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp 277.112.840	Rp 276.506.740	99,78%
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 473.456.000	Rp 471.718.938	99,63%
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp 254.901.000	Rp 253.303.138	99,37%
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 146.0004.000	Rp 145.947.300	99,96%
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp 72.551.000	Rp 72.468.500	99,89%
	Jumlah	Rp 2.575.021.771	Rp 2.542.041.938	98,72%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 1.316.205.986	Rp 1.286.389.739	97,73%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 126.840.000	Rp 102.300.000	80,65%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 126.840.000	Rp 102.300.000	80,65%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 104.200.000	Rp 101.460.000	97,37%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp 104.200.000	Rp 101.460.000	97,37%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp0	Rp0	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 539.239.474	Rp 537.307.027	99,64%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 101.612.440	Rp 101.371.000	99,76%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 54.060.284	Rp 53.900.000	99,70%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 60.501.750	Rp 58.975.000	97,48%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 323.065.000	Rp 323.061.027	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 518.672.712	Rp 518.672.712	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 518.672.712	Rp 518.672.712	100%

	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Rp 27.253.800	Rp 26.650.000	97,78%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 27.253.800	Rp 26.650.000	97,78%
	<i>Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</i>	Rp 1.258.815.785	Rp 1.255.652.199	99,75%
	<i>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	Rp785.359.785	Rp 783.933.261	99,82%
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp 281.537.945	Rp 280.725.623	99,71%
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp 226.709.000	Rp 226.700.898	100%
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp 277.112.840	Rp 276.506.740	99,78%
	<i>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	Rp 473.456.000	Rp 471.718.938	99,63%
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp 254.901.000	Rp 253.303.138	99,37%
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 146.0004.000	Rp 145.947.300	99,96%
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp 72.551.000	Rp 72.468.500	99,89%
	Jumlah	Rp 2.575.021.771	Rp 2.542.041.938	98,72%
Biro Organisasi				
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.297.286.101	2.274.358.076	99,00%
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	842.991.000	842.547.007	99,95%
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	351.738.000	351.505.214	99,93%
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	217.835.000	217.661.423	99,92%
	Penataan Analisa Jabatan	273.418.000	273.380.370	99,99%
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.454.295.101	1.431.811.069	98,45%
	Pembinaan Pelaksana Reformasi Birokrasi	408.824.000	406.786.841	99,50%
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	346.820.000	332.135.720	95,77%
	Evaluasi Pelaksana Budaya Kerja	118.386.000	114.347.780	96,59%
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintah	269.997.000	269.996.000	100,00%
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	310.268.101	308.544.728	99,44%
Biro Umum				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	321.058.534.026	311.968.125.456	97,17%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	73.692.338.410	71.432.389.035	96,93%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72.549.546.000	70.411.606.872,00	97,05%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.142.792.410	1.020.782.163,00	89,32%
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	2.132.946.046	2.042.445.789	95,76%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	275.000.000	272.138.000,00	98,96%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.857.946.046	1.770.307.789,00	95,28%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	91.846.603.120	93.356.772.056	101,64%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.935.386.695	21.740.628.280,00	99,11%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.156.397.385	6.653.311.497,00	92,97%

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.149.477.666	2.135.281.121,00	99,34%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.541.033.449	1.533.497.737,00	99,51%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.776.307.925	57.062.861.282,00	104,17%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.288.000.000	4.231.192.139,00	98,68%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	30.130.576.795	29.431.124.115	97,68%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	269.060.000	264.386.000,00	98,26%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.830.700.800	9.485.112.198,00	96,48%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	528.000.000	528.000.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.502.815.995	19.153.625.917,00	98,21%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	95.233.641.129	91.491.603.158	96,07%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.721.130.559	1.612.417.211,00	93,68%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.421.694.931	13.348.180.308,00	99,45%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Bangunan Lainnya	10.855.909.452	10.552.457.386,00	97,20%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	69.234.906.187	65.978.548.253,00	95,30%
	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	14.109.955.000	10.998.300.215	77,95%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	13.359.955.000	10.401.640.959,00	77,86%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	596.259.256,00	99,38%
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150.000.000	400.000,00	0,27%
	<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>	13.912.473.616	13.215.491.088	94,99%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8.559.949.616	8.303.456.616	97,00%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.722.524.000	2.634.591.344	96,77%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.630.000.000	2.277.443.128	86,59%
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	180.421.130.420	180.016.108.829	99,78%
	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	180.421.130.420	180.016.108.829	99,78%
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	180.421.130.420	180.016.108.829	99,78%
	Jumlah	501.479.664.446	491.984.234.285	98,11%
Biro Administrasi Pimpinan				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.157.150.928	13.135.398.019	92,78
	<i>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</i>	3.771.460.218	3.234.775.562	85,77
	<i>Fasilitasi Keprotokolan</i>	10.160.690.710	9.680.122.457	95,27
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	225.000.000	220.500.000	98

Uraian penjelasan tabel Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah:

Program/Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang ditampung pada DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu Tahun 2024 merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Penggunaan Anggaran dilakukan secara efektif dan efisien sehingga terjadi efisiensi anggaran pada masing-masing Program/Kegiatan.

Uraian penjelasan tabel Biro Kesejahteraan Rakyat:

Program/Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditampung pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu Tahun 2023 merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja sebesar 90%. Penggunaan Anggaran dilakukan secara efektif dan efisien sehingga terjadi efisiensi anggaran pada masing-masing Program/Kegiatan.

Uraian penjelasan tabel Biro Pengadaan Barang dan Jasa:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditampung pada DPA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu Tahun 2024 merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Penggunaan Anggaran dilakukan secara efektif dan efisien sehingga terjadi efisiensi anggaran pada masing-masing Program/Kegiatan. Uraian capaian realisasi anggaran pada tabel 3.10.

Uraian penjelasan tabel Biro Administrasi Pembangunan:

Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu memiliki 2 Program 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dimana Anggaran Perubahan APBD dengan total anggaran sebesar Rp. 2.575.021.771 (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp 2.542.041.938 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Uraian penjelasan tabel Biro Umum:

Biro Umum Setda Provsu memiliki 35 Program /Kegiatan dimana masing-masing kegiatan memiliki capaian persentase realisasi 98,11 % dengan total anggaran sebesar Rp. 501.479.664.446 (Lima Ratus Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi

anggaran Rp. 491.984.234.285,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

Uraian penjelasan tabel Biro Administrasi Pimpinan:

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa dari Aspek Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu dimana bila dilihat dari Indikator Utama target 100% dan realisasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 98.47%.

Bila dilihat dari Aspek Keuangan dimana Alokasi Anggaran pada masing-masing kegiatan dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Aspek Keuangan menunjukkan angka pada interval 85-100% yang menghasilkan Interval Capaian Kinerja 98.47%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) sasaran strategis tercapai dan tidak ada sasaran strategis tidak tercapai.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong dialog terbuka antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Memperkuat kerangka hukum yang mengatur proses tersebut.
4. Menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat.
5. Mendorong kerjasama antara lembaga pemerintah dan swasta.
6. Mengembangkan strategi jangka panjang yang berkelanjutan.
7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

- 2. Biro Kesejahteraan Rakyat**, Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk terus meningkatkan kinerja adalah :

- a. Pengembangan kebijakan nasional terkait kodifikasi dan nomenklatur, menjadi salah satu kesempatan untuk penataan kelembagaan dengan tugas dan fungsi yang lebih jelas, tidak tumpang tindih dengan Perangkat Daerah yang menjadi mitra dan juga bisa mengakomodir semua tugas-tugas yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Penyempurnaan mekanisme dan meningkatkan pelayanan administrasi baik tingkat kualitas maupun kuantitas dengan menyusun Standar Operasional Prosedur yang jelas, sesuai dengan proses bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut perlu dilakukan dengan melihat pada proses bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mengenali posisi Biro dan hubungannya dengan Perangkat Daerah lain, dimana Biro merupakan unsur staf di Sekretariat Daerah yang menunjang kinerja Sekretaris Daerah dan menjadi second opinion Gubernur dan berbeda dengan Dinas yang merupakan front liner unsur Pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak pelaksanaan rumusan kebijakan.
 - c. Peningkatan upaya koordinasi dengan berbagai Instansi terkait baik pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif, agar dapat mengoptimalkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
 - d. Sangat diperlukan saran dari stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Mengoptimalkan SDM yang ada melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis.
- 3. Biro Hukum, LKIP Tahun 2024** yang telah disusun Biro Hukum Setdap Povsu menunjukkan pencapaian kinerja yang dibangun atas jerih payah seluruh pegawai Biro Hukum Setdap Povsu dan kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari terwujudnya semua sasaran strategis Biro Hukum Setdap Povsu yang dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Berangkat dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan kepada pemberi delegasi, wewenang, seperti lazimnya penerapan bentuk-bentuk sistem baru, diperlukan persiapan sumber daya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh karena itu Laporan Kinerja ini dipandang sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi.

- 4. Biro Perekonomian,** beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran strategis Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah jika dirata-ratakan dari segi capaian kinerja adalah sebesar 100,00% atau dengan kategori TINGGI sedangkan dari segi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,17% dengan kategori SANGAT TINGGI.

Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran kinerja tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi terbaik untuk mengatasinya.

- 5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa,** Realisasi belanja melalui e-purchasing belum signifikan dan sebagian Perangkat Daerah belum mencatat hingga tahapan serah terima pada aplikasi katalog elektronik sehingga nilai indikator pemanfaatan sistem pengadaan belum maksimal. Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provsu adalah sebagai berikut:
- a. Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menugaskan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penyelesaian paket pekerjaan e-Purchasing melalui katalog elektronik dan pengisian e-Kontrak serta pencatatan non-tender dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
 - b. Pemerintah Kab/Kota agar mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung 17 Standarisasi LPSE.
- 6. Biro Administrasi Pembangunan,** Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat keberhasilan kinerja Biro Administrasi Pembangunan adalah Kurangnya

kepedulian dari Admin yang sudah di unjuk Perangkat Daerah pada Penginputan Realisasi Anggaran fisik dan non fisik pada Perangkat Daerah.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU adalah sebagai berikut:

1. Menyurati Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagai teguran dalam Penginputan Realisasi Anggaran pada Aplikasi PRP2SUMUT.
2. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada seluruh Admin PRP2SUMUT.
3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

7. Biro Organisasi, Hasil laporan kinerja Biro Organisasi Setda ProvSU Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Target kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dicapai dengan realisasi rata-rata per indeks kinerja utama hampir mencapai 100%;
- b. Indikator kinerja Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran tahun 2024 ditargetkan 100%, terealisasi 100% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan yang Sangat Baik.
- c. Secara umum kualitas pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dipersepsikan baik oleh pengguna layanan (masyarakat). Hal ini terlihat dari Indeks Pelayanan Publik yang diperoleh yaitu 3,90. Hasil yang terlihat belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 4.30. Hal ini disebabkan adanya perubahan dan penambahan unit kerja yang dievaluasi dari tahun sebelumnya. Tahun 2019-2022, unit kerja yang dievaluasi adalah Dinas PM-PTSP dan UPTD Samsat Medan Selatan, Tahun 2023 adanya perubahan unit kerja yang dievaluasi yaitu Dinas Sosial, UPTD Samsat Binjai dan UPTD Khusus RSUD. Haji Medan, dan Tahun 2024 adanya penambahan unit Pelayanan khusus yang dievaluasi yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip dan UPTD Museum Negeri.
- d. Untuk tahun 2024, nilai capaian pelaporan kinerja ditargetkan 11.75. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah dicantumkan dalam dokumen P-Renstra Biro Organisasi Tahun 2024-2026. Hasil Nilai capaian pelaporan kinerja pada Tahun 2024 adalah 11.45.
- e. Permasalahan dan Kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi dalam mencapai keineja adalah :
 - Dinamika kebijakan tentang kelembagaan yang begitu cepat, berdampak pada perubahan organisasi.

- Masih ada kecenderungan dari masing-masing untuk membentuk Perangkat Daerah yang tidak didasarkan pada kebutuhan, kemampuan dan potensi sehingga pembengkakan organisasi dan beban kerja daerah.
- Belum seluruh perangkat daerah merespon secara baik untuk memberikan pelayanan kepada pengguna layanan serta kualitas pelayanan belum optimal.
- Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang sistematika penyusunan laporan kinerja.
- Penyajian laporan kinerja dari Perangkat Daerah belum menunjukkan kriteria pelaporan yang baik sehingga mempengaruhi laporan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Biro Organisasi Setda Provsu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang sesuai dengan fungsi dan ukuran yang tepat, sejalan dengan peraturan yang berlaku, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi.
- b. Melaksanakan evaluasi dan monitoring Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara secara berkelanjutan dampak dari evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan dengan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja serta melakukan pendampingan khususnya kepada unit kerja yang dievaluasi, sehingga diharapkan dapat mencapai target dalam hal Indeks Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Utara dengan memperhatikan form penilaian dari Kementerian PAN dan RB RI serta kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan penilaian dari Kementerian PAN dan RB RI, sehingga nilai capaian pelaporan kinerja mencapai target yang diinginkan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) Provinsi Sumatera Utara.
- e. Diperlukan peningkatan komitmen bersama untuk secara efektif menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola serta melaksanakan program kegiatan di Biro Organisasi.

- f. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

8. Biro Umum, Biro Umum Setda Provsu memiliki 2 sasaran strategis dengan 1 sasaran strategis tercapai dan 1 sasaran strategis tidak tercapai.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis untuk mendorong berkembangnya loyalitas, partisipasi, transparansi, kreativitas, produktivitas dan inovasi.
2. Meningkatkan kemauan kerja keras dan kemampuan aparatur yang profesional.
3. Memantapkan prosedur kerja dan tata kerja.
4. Mengutamakan budaya kerja dan disiplin kerja.
5. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja kedepannya.
7. Menciptakan SDM yang berkualitas, berdaya saing, memiliki jiwa profesionalisme dan mampu menjawab tantangan kinerja.

Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

9. Biro Administrasi Pimpinan, LKjIP Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu memiliki satu sasaran strategis dan sasaran strategis tersebut tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu adalah:
 - a. Upaya dan terobosan telah mengarah pada peningkatan peran dalam memberikan pelayanan terhadap kegiatan pimpinan yang baik, antara lain perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyiapan materi dan komunikasi pimpinan, keprotokolan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu pemerintah daerah dan pimpinan.

- b. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah.
- c. Dalam urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan yang merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu. Kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu berupa penyediaan dan penyiapan materi rapat dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, memfasilitasi penyelenggaraan komunikasi pimpinan mulai dari mencari, mengolah hingga menyajikan bahan untuk komunikasi pimpinan, dan pengelolaan dokumentasi pimpinan berupa dokumentasi Gubernur dan Wakil Gubernur, cendera mata dari tamu pemerintah daerah dan dokumentasi penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- d. Sedangkan untuk urusan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah, kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu adalah pelayanan keprotokolan dalam penyelenggaraan acara dan kegiatan pimpinan berupa fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara dalam bentuk pelayanan keprotokolan yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemberian dukungan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah dan Pimpinan. Fasilitasi kunjungan tamu mencakup penjemputan, akomodasi penginapan serta penjadwalan kegiatan bersama pimpinan.
- e. Pencapaian target kinerja secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini ditandai dengan adanya komitmen yang kuat dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pencapaian realisasi anggaran kegiatan yang mendukung Kinerja Utama sebesar 92.78%.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan yang perlu dilakukan oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu adalah sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan pelayanan administrasi penyusunan bahan materi paparan pimpinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan satu pintu melalui Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Aparatur di bidang perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja diharapkan diselenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) baik yang diselenggarakan secara Internal maupun oleh Instansi Lain.

3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

PL SEKRETARIS DAERAH

M. A. EFFENDY POHAN



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
